Dr. Dety Mulyanti, M.Pd

KAPITA SELEKTA



CV Kimfa Mandiri 2017

ISBN : 978-602-50828-5-6



Dr. Dety Mulyanti, S.Pd, M.Pd.
Lahir di Majalengka 15 September 1979 Pendidikan S1 Universitas Pasundan 2006, Pendidikan S2 Universitas Pendidikan Indonesia 2009, S3 Universitas Islam Nusantara 2015. Mengajar di beberapa perguruan tinggi swasta dan dosen tetap Universitas Bale Bandung (UNIBBA). Dr. Dety Mulyanti, dosen fakultas keguruan ilmu pendidikan, program studi pendidikan IPS UNIBBA. Fokus penelitian pada pendidikan, budaya, ekonomi, manajemen yang telah diterbitkan di beberapa jurnal nasional, internasional bereputasi. Selain aktif di dunia akademisi, aktif di organisasi menjadi Wasekjen ABPPTSI (Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia) di Pusat dan Jabar.

ISBN 978-602-50828-5-6

KAPITA SELEKTA

Penulis :

Dr. Dety Mulyanti, M.Pd.

ISBN : 978-602-50828-5-6

Editor :

Prof. Dr. Thomas Suyatno

Dr. H. R. Ricky Agusiady, S.E., M.M. AK., CFrA

Penyunting :

Dr. Mulyaningsih, M.Si.

Dr. Drs. Y. Ony Djogo, SH.MM.MAP.

\

Desain Sampul dan Tata Letak :

Resty Ismawanti, S.Pd, MM

Penerbit :

CV KIMFA MANDIRI

Redaksi :

Jl. Ciapus RT 001 RW 006 Desa Ciapus

Kec. Banjaran Kab. Bandung 40377

No Telepon : 022-88883057 / 082217220165 – 081220816826

Email : kimfamandiriks@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas rahmat-Nya yang telah tercurah, sehingga penulis bisa menyelesaikan Buku Kapita Selekta. Adapun tujuan dari disusunnya buku ini adalah memberikan kemampuan kepada mahasiswa dan calon pendidik dapat mempersiapkan diri menghadapi masalah pendidikan dalam dunia nyata.

Tersusunnya buku ini tentu bukan dari usaha penulis seorang. Dukungan moral dan material dari berbagai pihak sangatlah membantu tersusunnya buku ini. Untuk itu, penulis ucapkan terima kasih kepada keluarga, sahabat, rekan-rekan, dan pihak-pihak lainnya yang membantu secara moral dan material bagi tersusunnya buku ini.

Buku yang tersusun sekian lama ini tentu masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu, kritik dan saran yang membangun sangat diperlukan agar buku ini bisa lebih baik nantinya.

Bandung, Januari 2017

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL
LEMBAR PENGESAHAN …… i
KATA PENGANTAR …… ii
DAFTAR ISI …… Iii

BAB I PENDAHULUAN

A. Perkembangan Sistem Pendidikan di Indonesia…… 1
B. Pengertian Reformasi Pendidikan Nasional……..... 21
C. Asumsi Pelaksanaan Reformasi Pendidikan Nasional……..... 23
D. Tendensi Reformasi Pendidikan Nasional……..... 25
E. Dasar Reformasi Pendidikan Nasional…… 26
F. Implementasi Reformasi Pendidikan Nasional……... 26
G. Kondisi Reformasi Pendidikan Di Indonesia……... 27
H. Implikasi Permasalahan Reformasi Pendidikan Nasional……... 28
I. Solusi Permasalahan Reformasi Pendidikan Nasional …….. 28

BAB II BUDAYA NASIONAL SEBAGAI DASAR PENDIDIKAN

A. Pengertian Pendidikan dan Budaya…… 30
B. Konsep Budaya Nasional sebagai Dasar Pendidikan …… 32
C. Keterkaitan Antara Pendidikan dan Kebudayaan……... 33
D. Konsepsi Budaya Nasional……. 33
E. Fungsi dan Nilai-Nilai Budaya Nasional sebagai Dasar Pendidikan……. 34
F. Implementasi Budaya Nasional sebagai Dasar Pendidikan……. 34
G. Implikasi Masalah dan Solusi…….. 34

BAB III WAJIB BELAJAR DALAM SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

A. Asumsi Dan Tendensi Wajib Belajar……..... 36
B. Dasar Undang-Undang Wajib Belajar…….. 37
C. Tujuan Diadakannya Program Wajib Belajar…….. 38
D. Hambatan Program Wajib Belajar…… 39
E. Cara Mengatasi Hambatan Belajar……... 40
F. Implementasi Program Wajib Belajar di Indonesia……... 41

BAB IV PENDIDIKAN PRASEKOLAH

A. Konsep Pendidikan Prasekolah…… 42
B. Landasan UU tentang Pendidikan prasekolah…….. 45
C. Kurikulum Pendidikan Prasekolah……..... 46

BAB V SEKOLAH DASAR SEKOLAH RENDAH

A. Perkembangan Penyelenggaraan Sekolah Dasar di Indonesia……..... 47
B. Asumsi Pelaksanaan Sekolah Dasar di Indonesia……..... 48
C. Konsep Sekolah Dasar……... 48
D. Pengelolaan Sekolah Dasar di Indonesia…… 49
E. Implikasi Masalah Pendidikan Sekolah Dasar…… 49
F. Solusi Masalah Pendidikan Sekolah Dasar……. 49

BAB VI SEKOLAH MENENGAH KOMPREHENSIF

A. Tendensi dan Asumsi Penyelenggaraan Sekolah Menengah Komprehensif…… 51
B. Konsep Sekolah Menengah Komprehenshif……. 52
C. Pelaksanaan Sekolah Menengah Komprehensif di Indonesia…….. 52
D. Pendidikan Komprehensip dengan Inovasi Pembelajaran…… 53
E. Implikasi Masalah Pendidikan Sekolah Menengah Komprehensif……..... 53
F. Solusi Permasalahan Pendidikan Sekolah Menengah Komprehensif…… 54

BAB VII PENDIDIKAN GURU

A. Asumsi Pendidikan Guru…… 56
B. Konsep Sistem Pendidikan Guru ……,……... 58
C. Komponen-Komponen Sistem Pendidikan Guru…….. 58
D. Syarat-Syarat Menjadi Guru……..... 60
E. Lembaga Pendidikan Keguruan…… 62
F. Implikasi Masalah Pendidikan Guru……..... 64
G. Solusi Permasalahan Pendidikan Guru…….. 65

BAB VIII PENDIDIKAN INTERNASIONAL

A. Tendensi dan Latar Belakang Pendidikan Internasioanal……..... 65
B. Asumsi Pendidikan Internasional……... 65
C. Pendidikan Internasional dalam *Inter* Cultural *Education*…… 65

D. Pendidikan Internasional dan Pertukaran Siswa/Mahasiswa…….…….. 66
E. Pelaksanaan Pendidikan Intenasional di Indonesia…….……..... 68
F. Implikasi Masalah dalam Pendidikan Internasional……..... 69
G. Solusi terhadap Permasalahan Pendidikan Internasional……. 70

BAB IX PENDIDIKAN WANITA

72
A. Konsep Pendidikan Wanita/Gender…….. 72
B. Urgensi Pendidikan Wanita…….. 74
C. Berbagai Manifestasi Ketidakadilan Gender……..…….…… 75
D. Faktor Penyebab Ketidakadilan Gender……..…… 76
E. Mendidik Anak Perempuan Menampung Masa Depan…….. 76
F. Konsep Citra Wanita……. 78
G. Ideologi Gender dan Pengembangan Karier Perempuan……..……..... 80
H. Wanita dan Kepemimpinan…….……..…….....

BAB X PENDIDIKAN SEKS

81
A. Asumsi dan Konsep Pendidikan Seks……..……..... 82
B. Pendidikan Seks di Keluarga……... 82
C. Peranan Sekolah dalam Pendidikan Seks…… 84
D. Tujuan Pendidikan Seks…….. 85
E. Remaja dan Pendidikan Sex Pra Nikah……..……. 86
F. Pacaran dan Pendidikan Sex Pra nikah……..……. 87
G. Remaja, Pornografi dan Pendidikan Sex……..……..

DAFTAR PUSTAKA

BAB I :
PENDAHULUAN

A. Perkembangan Sistem Pendidikan di Indonesia

1. Perkembangan Sistem Pendidikan di Indonesia Pada Masa Pra Kolonialisme : Hindu-Budha

Pada umunya Indonesia menerima agama, pengetahuan dan kebudayaan dari Negara tetangga seperti India. Indonesia juga memperkaya dan memberi warna dan corak ke-Indonesiaan pada agama, pengetahuan sehingga menjadi spesifik Indonesia. Boleh dikatakan sejak dahulu pendidikan di Indonesia berdasarkan agama. Terdapat beberapa ciri pendidikan pada periode kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, antara lain:

a. Bersifat informal karena proses belajar mengajar tidak melalui institusi yang formal.
b. Berpusat pada religi, yaitu ajaran agama Hindu dan Buddha.
c. Aristokratis dimana pendidikan hanya diikuti oleh segolongan masyarakat saja, yaitu para raja dan bangsawan. Kaum bangsawan biasanya mengundang guru untuk mengajar anak-anaknya di istana disamping ada juga yang mengutus anak-anaknya yang pergi belajar ke guru-guru tertentu.
d. Pengelola pendidikan adalah kaum Brahmana untuk agama Hindu dan para Biksu untuk agama Buddha

Apabila ditinjau pada peninggalan Raja Mulawarman (abad 4 - 5) di Kutai, peninggalan itu berupa sebuah batu tertulis (yupa) dalam tulisan Pallawa di dalam bahasa Sanskerta. Ini menunjukkan adanya pengaruh Agama Siwa. Demikian juga peninggalan Purnawarman di Jawa Barat dalam tulisan Pallawa di dalam bahasa Sanskerta. Dari tulisan-tulisan itu dapat diketahui bahwa di Jawa Barat pernah berdiri kerajaan Tarumanegara. Prasati- prasasti tersebut didirikan para pendeta dari golongan Brahmana. Karena pada masa tersebut hanya mereka saja yang dapat membaca kitab-

kitab suci seperti kitab Weda. Mereka pula yang bertugas memberikan korban-korban dan menyanyikan pujian-pujian kepada dewa-dewa. Golongan inilah yang dapat menggunakan bahasa Sansekerta dan huruf Pallawa, sebagai bahasa resmi. Sehingga dapat dikatakan, pendidikan hanya ditujukan pada golongan yang berkasta tinggi saja, berhubung dengan kewajibannya sebagai penyuluh rakyat dan penghubung antara dewata dan rakyat.

Pada abad ke-6 berkembanglah di Sumatra sebuah kerajaan yaitu Kerajaan Sriwijaya yang kemudian menjadi pusat agama Budha. Raja- raja Sriwijaya wangsa Syailendra dan beragama Buddha. Empat buah batu bertulis ditemukan di Palembang, Jambi dan Bangka. Semuanya ditulis dalam huruf Pallawa di dalam bahasa Melayu tua bercampur perkataan-perkataan Sanskerta.

Kerajaan Sriwijaya menjadi kuat dan jaya karena perdagangannya dengan daerah-daerah di seberang lautan. Untuk perdagangan tersebut diperlukan kapal-kapal dan pegawai-pegawai yang dapat menjalankan kapal. Maka untuk itu diperlukan pendidikan untuk pegawai-pegawai tersebut. Perdagangan meminta pendidikan yang praktis dan langsung dapat dipakai di dalam perniagaan. Saudagar-saudagar pada waktu itu termasuk golongan bangsawan. Untuk memenuhi kebutuhan tenaga berdagang dengan negeri asing itu. Lalu muncullah Dubu, kota tempat berguru ilmu yang praktis untuk berdagang. Lambat laun Sriwijaya menjadi pusat pengetahuan.

Ibu kota Sriwijaya yang terletak di pertengahan jalan Tiongkok-India, ialah pusat perniagaan dan kebudayaan pada waktu tersebut. Oleh sebab itu, ibu kota menjadi pusat pertemuan saudagar asing dan pendeta-pendeta yang di dalam perjalanan dari India ke Tiongkok atau dari Tiongkok ke India. Ibu kota merupakan tempat menuntut ilmu yang perlu untuk perdagangan, juga tempat di mana kaum agama bertemu dan bertukar pikiran.

Di dalam agama Budha perniagaan dapat sejalan dengan agama. Sejarah Tiongkok di dalam abad ke-9 atau ke-10 memperlihatkan bahwa biara- biara tempat pendeta agama Buddha menjadi semacam bank; ada pula yang menjadi tempat

pertemuan saudagar-saudagar asing. Dengan demikian ibu kota menjadi pusat perdagangan dan pusat agama pada saat bersamaan.

Sebagai pusat pengajaran Buddha, Sriwijaya menarik banyak peziarah dan sarjana dari negara-negara di Asia. Antara lain pendeta dari Tiongkok I- Tsing. I-Tsing yang meninggalkan Canton pada tahun 671. Ia tinggal di Che-li- fo-che (Sriwijaya) untuk mempelajari ilmu aturan Sansekerta.10 I-Tsing mengatakan bahwa di negeri Fo-shih yang dikelilingi oleh benteng, ada lebih dari seribu orang pendeta Buddha yang belajar agama Buddha seperti halnya yang diajarkan di India (Madhyadesa). Jika seorang pendeta Cina yang ingin belajar ke India, untuk mengerti dan membaca kitab Buddha yang asli di sana, ia sebaiknya belajar dulu setahun dua tahun di Fo-shih, baru setelah itu ia pergi ke India.

Setelah 6 bulan di Che-li-fo-che, ia berangkat ke Melayu. Dua bulan kemudian I-Tsing meneruskan perjalanan ke India tepatnya ke Nalanda dengan melalui Kedah. Sepuluh tahun kemudian ia kembali dari belajar di Universitas Nalanda (India), I-Tsing tinggal di Fo-shih selama empat tahun untuk menterjemahkan kitab Buddha bersama pendeta Buddha yang ternama di Sriwijaya, yaitu Satyakirti dari bahasa sansekerta ke dalam bahasa Cina. Setelah empat tahun di sana menjalin dan menterjemahkan buku-buku agama Buddha, pergilah ia ke Canton untuk menjemput pembatu. Lalu ia kembali dengan empat orang.

Di samping kitab-kitab agama yang digarapnya, I-Tsing berhasil menulis dua biografi musafir-musafir pendahulunya dan suatu karya berbobot lainnya mengenai pelaksanaan agama Buddha di India dan di Semenanjung Melayu. Karya-karya ilmiahnya dikirimke Cina melalui ulama-musafir pada 692 M. Sedangkan, I-Tsing pung ke Canton pada tahun 695 M. Sriwijaya merupakan pusat ilmu pengetahuan tempat para sarjana dan teolog Buddha sangat dihormati dan dihargai. Oleh sebab itu, para musafir dan ulamasenang mendalami ilmu pengetahuan di Sriwijaya, baik yang bersumber dari agama Buddha Mahayana maupun Hinayana.14 Salah seorang dari tujuh orang guru agama Buddha yang paling terkenal pada zaman I-Tsing ialah Shakyakirti yang tinggal di Sriwijaya. Ia adalah pengarang Hastadandashastra, yang kemudian disalin I-Tsing ke bahasa Tiongkok.

Walaupun setelah lewat pertengahan abad ke-7, Mazhab Hinayana dominan di Sriwijaya, setengah abad tersebut Mazhab Mahayana sempat berpengaruh. Seorang mahaguru Sriwijaya yang termasyhur bernama Dharmapala adalah guru besar yang pernah memberikan kuliah-kuliahnya pada "universitas" Nalanda di Benggala (India utara) selama 30 tahun. Perguruan tinggi yang ada di Sriwijaya tidak kalah mutunya dengan yang ada di tanah suci India. Maka dari itu, banyak teolog dan musafir Buddha belajar pula di Sriwijaya.

Pada abad ke-7, Dharmapala datang di Sumatra dan memberi pelajaran agama Buddha Mahayana kepada penduduk setempat, yang semula menganut Hinayana. Keterangan-keterangan ini diperoleh dari I-Tsing, yang pada 672 dan 685 M berdiam di Palembang untuk belajar. Sehingga dapat dikatakan bahwa pendidikan pada masa itu memusatkan perhatiannya pada agama.

Universitas Nalanda pada masanya menjadi pusat pengetahuan dan terkenal ke mana-mana serta mempunyai pelajar-pelajar yang terkenal dari Tiongkok, Jepang dan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Maka tidaklah mengherankan apabila ketika itu kesusasteraan di Sriwijaya sudah tinggi tingkatannya. Raja Sriwijaya menyuruh membuat kamus bahasa daerah- daerah Sansekerta.

Prasasti Nalanda yang dibuat di India pada sekitar pertengahan abad ke-9 M menyebutkan bahwa raja Balaputradewa dari Suwarnabhumi (Sriwijaya) meminta kepada raja Dewapaladewa agar memberikan sebidang tanah untuk pembangunan asrama yang digunakan sebagai tempat bagi para pelajar agama Buddha yang berasal dari Sriwijaya. Berdasarkan prasasti tersebut, dapat diketahui bahwa sangat besar perhatian dari raja Sriwijaya terhadap perkembangan agama Buddha terlihat dari dikirimkannya beberapa pelajar dari Sriwijaya untuk belajar agama Buddha di India (Universitas Nalanda). Hingga permulaan abad 11 kerajaan Sriwijaya masih merupakan pusat pengajaran agama Buddha yang bertaraf internasional. Rajanya saat itu bernama Sri Cudamaniwarman dan mengaku dirinya dari Dinasti Syailendra. Untuk menghadapi ancaman dari Jawa, Cudamaniwarman mengadakan hubungan persahabatan dengan Cina dan Cola, yang saat itu merupakan dua kekuatan besar di Asia Tenggara.

Pada masa pemerintahan Cudamaniwarman ini, pendeta Dharmaktri salah seorang pendeta tertinggi di Suwarnadwipa dan tergolong ahli pada masa itu, menyusun kritik tentang sebuah kitab ajaran agama Buddha. Dari tahun 1011 hingga 1023 seorang biksu dari Tibet bernama Atisa datang ke Suwarnadwipa untuk belajar agama kepada Dharmaktri. Selain di Sumatra, pendidikan yang berbasis agama Buddha juga terdapat di Jawa pada abad ke-7. Berdasarkan catatan perjalanan I-Tsing menyebutkan bahwa datanglah seorang pendeta Tionghoa bernama Hwi-Ning dengan pembantunya Yun-ki ke Ho-ling, guna menerjemahkan beberapa kitab suci agama Budha dari bahasa Sansekerta ke bahasa Tionghoa dengan bantuan seorang pendeta Ho-ling yang bernama Joh-na-poh-t'o-lo atau Jnanabhadra.

Tujuannya adalah menerjemahkan bagian terakhir dari kitab Nirwanasutra. Dari berita ini menunjukkan bahwa di daerah Jawa juga menjadi rujukan bagi pendeta yang berasal dari daerah lain untuk mempelajari agama dengan para pendeta yang berasal dari Indonesia. Jnanabadra selain dikenal sebagai seorang pujangga sastra dan bahasa, juga dikenal sebagai seorang juru tafsir dari kitab-kitab agama Buddha. Di dalam proses pengolahan karya-karya ilmiah maupun kerja-kerja penerjemahan, selain bahasa Sansekerta, juga digunakan bahasa "Kw'un-lun" yang dalam hal ini dimaksudkan bahasa Jawa Kuno.

Baru pada abad ke-8 terutama di Mataram kuno didapatkan bahan- bahan yang lebih memberi pengertian tentang pendidikan dan pengajaran. Di Candi Borobudur terlihat lukisan yang menggambarkan suatu sekolah seperti yang berlaku pada waktu sekarang. Di tengah-tengah pendapa besar seorang Brahmana duduk dilingkari oleh murid-murid, semua membawa buku. Mereka belajar membaca dan menulis. Murid-murid tinggal bersama-sama dengan Brahmana dalam suatu rumah. Gurunya tidak menerima gaji, dijamin oleh siswanya untuk hidup.

Para siswa di samping belajar juga bekerja. Buku-buku para siswa terdiri dari daun lontar (seperti di museum Bali). Buku-buku, inilah yang memberi bukti bahwa bangsa kita pada waktu itu telah pandai membaca bahasa Sanskerta (Kawi). Huruf yang dipakai adalah huruf Jawa (Jawa Kuno). Dasar pendidikan dan pengajaran adalah agama

Buddha atau Brahma. Kesimpulan ini dapat diambil dari adanya agama Buddha atau Brahma di Jawa Tengah (Borobudur).

Berhubung dengan perkembangan pendidikan dan pengajaran di Mataram kuno ini, berita dari Tiongkok mengatakan bahwa sebelum Sanjaya telah ada kebudayaan Hindu, sungguh pun Mataram pada waktu itu belum mencapai puncak kekuasaan. Ada sekolah seorang raja putri dan suatu sekolah agama Buddha yang dipimpin oleh orang Jawa bernama Jnanabadra yang terkenal diseluruh dunia. Agama Buddha yang diajarkan adalah agama Buddha Hinayana. Agama Buddha Mahayana baru dalam abad ke-8. Selain pengajaran agama (di dalam buku-buku Weda & Upanisad) mungkin sekali para siswa mempelajari kepustakaan Hindu seperti Mahabarata dan Ramayana. Terbukti dari relief Candi Prambanan dihias dengan riwayat Sri Rama dengan lengkap. Berdasarkan hal-hal di atas kita dapat membayangkan pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh para Brahmana kepada para siswa:

a. Agama Buddha dan Brahma;
b. Kepustakaan Mahabarata dan Ramayana;
c. Filsafat dan Etika;
d. Kesenian (bangunan, lukisan dan pahat);
e. Ketuhanan;
f. Kenegaraan;
g. Ilmu bangunan (candi-candi).
h. Ilmu pasti dan ilmu alam, yang memungkinkan diadakannya perhitungan-perhitungan mengenai pembangunan candi-candi. Pendidikan pada waktu itu telah teratur dengan baik dan pendidikan pada waktu itu mengutamakan budi pekerti dan kesusialaan.

Di bawah pimpinan Sanjaya, Mataram mengalami kemakmuran. Tidak ada tindak kriminal. Dalam zaman itu kepustakaan Jawa Kuno telah berkembang. Menurut Dr. Stuterheim, Candi Sari dan Plaosan mungkin sekali merupakan tempat penyimpanan buku-buku suci. Seorang guru bernama Wicawamitra yang juga merupakan seorang Brahmana, keahliannya tentang sastra sangat tinggi. Dia memberi pelajaran di sekolah

rendah. Pada zaman Raja Airlangga, kebudayaan mendapat perhatian pada masa itu. Maka, terbitlah buku Arjuna Wiwaha yang dikarang oleh Empu Kanwa dan kitab Mahabarata yang berbahasa Sanskerta telah berhasil diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa Kuno. Akan tetapi, rakyat biasa pun belum dapat menikmatinya. Pendidikan hanya untuk keluarga raja yang nantinya akan memegang pemerintahan. Pada zaman pemerintahan Jayabaya (Kediri) pun, kebudayaan telah mendapat perhatian. Hal ini terbukti adanya kitab Baratayuda yang dikarang Empu Sedah dan diselesaikan oleh Empu Panuluh.

2. Perkembangan Sistem Pendidikan di Indonesia Pada Masa Pra Kolonialisme : Islam

Lembaga pendidikan Islam telah memainkan fungsi dan perannya sesuai dengan tuntutan masyarakat pada zamannya. Adapun lembaga pendidikan di Indonesia pada zaman penyebaran Islam antara lain :

1. Mesjid / Surau

   Sistem pengajaran secara *hoofdelyk* atau individual. Yang secara individual anak satu persatu kehadapan guru sedang anak yang lain menunggu gilirannya.42 Sementara menunggu, murid-murid lainnya duduk bersila melingkar dengan tetap berlatih melagukan ayat-ayat suci. Di sini sang guru melakukan koreksi kepada bacaan murid-murid yang salah mengucapkannya. Pelajaran biasanya diberikan pada pagi hari (habis shubuh) atau petang hari (sesudah atau sebelum magrib) dengan lama pertemuan tiap harinya sekitar satu hingga dua jam. Proses tersebut biasa selesai atau dapat diselesaikan selama beberpa bulan, tetapi umumnya sekitar 1 tahun. Murid-murid yang belajar di langgar tidak dipungut uang sekolah. Kalaupun ada, uang sekolah yang diberikan itu tergantung kepada kerelaan orangtua murid yang dapat memberikan tanda mata berupa benda-benda atau uang. Sesudah murid menyelesaikan pelajaran dalam arti tamat membaca Al- Qur’an, biasanya diadakan selamatan dengan mengundang makan teman- teman murid atau kerabat dekat, di rumah guru atau di langgar. Hubungan antara murid dan guru pada umunya berlangsung terus walaupun murid kemudian meneruskan pendidikan pada lembaga pendidikan yang lebih tinggi.

2. Pesantren

Di pesantren yang diajarkan ialah berbagai kitab Islam klasik dalam bidang fiqih, teologi, dan tasawuf. Pesantren ini kemudian menjadi salah satu pusat penyiaran Islam. Beberapa pusat pesantren yang menjadi penyiaran agama Islam adalah sebagai berikut: Syamsu Huda di Jembrana (Bali), Tebuireng di Jombang, Al-Kariyah di Banten, Tengku Haji Hasan di Aceh, Tanjung Singgayang di Medan, Nahdlatul Watan di Lombok, Asadiyah di Wajo (Sulawesi), Syaikh Muhammad Arsyad Al-Banjar di Martapura (Kalimantan Selatan), dan banyak lainnya. Pembagian waktu kegiatan sehari-hari di pesantren sebagai berikut:

1) Pukul 5 pagi mereka menjalankan ibadat
2) Sesudah itu, mereka mengerjakan kegiatan atau pekerjaan untuk kepentingan guru, seperti membersihkan halaman dan bekerja di pertamanan dan ladang. Perlu dicatat di sini bahwa guru-guru di pesantren tidak menerima gaji untuk penggantian jerih payahnya
3) Kalau pekerjaan ini selesai, pengajaran yang sesungguhnya dimulai
4) Sehabis makan siang, para santri beristirahat. Lalu belajar lagi, tetapi tidak melupakan kewajiban mereka beribadah
5) Beberapa santri menjaga keamanan pada waktu malam.

3. Madrasah

Peralihan dari agama dan kebudayaan Hindu/Budha menuju Islam pada umumnya berlangsung secara damai dan tenang. Ketika agama Islam memasuki Indonesia, pengaruh dan cara berpikir Hindu masih kuat dan berakar. Pada masa itu, ada dua tipe guru. Pertama adalah guru untuk kalangan keraton dan bangasawan yang diundang atau hidup dikalangan keraton untuk mengajar para putra raja dan kestria lainnya. Kedua adalah guru pertapa yang bertapa di tempat-tempat yang menyendiri, jauh dari keramaian sambil belajar serta mendalami ilmi-ilmu ketuhanan serta ilmu-ilmu lainnya.

4. Meunasah

   Umumnya pendidikan berlangsung selama dua sampai sepuluh tahun. Pengajaran umumnya berlangsung malam hari. Materi pelajaran dimulai dengan membaca Al-Qur'an yang dalam bahasa Aceh disebut Beuet Quran. Biasanya pelajaran diawali dengan mengajarkan huruf hijaiah. Selanjutnya membaca juz amma, sambil menghafalkan surat-surat pendek. Setelah itu ditingkatkan dengan membaca Al-Qur'an dilengkapi dengan tajwidnya. Di samping itu, diajarkan pula pokok-pokok agama seperti rukun iman, rukun Islam, dan sifat-sifat Tuhan. Adapula rukun sembahyang, rukun puasa serta zakat. Pelajaran menyanyi juga diajarkan, terutama nyanyian yang berhubungan dengan agama yang dalam bahasa Aceh disebut dike atau seulaweut (zikir atau selawat). Buku-buku pelajaran yang digunakan adalah buku-buku yang berbahasa Melayu seperti kitab parukunan dan Risalah Masail al-Muhtadin.

5. Rangkang

   Rangkang dapat disamakan tingkatannya dengan Madrasah Tsanawiyah. Peserta didik pada tingkat rangkang berasal dari anak-anak kampung yang telah menyelesaikan pelajarannya di Meunasah. Bagi mereka yang ingin melanjutklan pelajaran yang lebih tinggi mereka diantarkan oleh orang tuanya ketempat itu. Karena pembangunan rangkang berjauhan dengan kampung, peserta didik kebanyakan memondok di kawasan rangkang. Waktu belajar di rangkang biasanya pagi dan sore. Pada malamnya mereka belajar dengan teman-temannya di tempat pemondokan masing-masing. Cara belajar berkelompok sudah lama dipraktekkan di rangkang dengan bimbingan kawan sebaya (Tengku Sida).

6. Dayah

   Peserta didik tingkat dayah adalah mereka yang telah menyelesaikan pendidikannya dirangkang. Pendidikan tingkatan ini dapat dikatan sama dengan Madrasah Aliyah sekarang. Pendidikan tingkat dayah diatur lebih rapi. Pada umumnya peserta didik memondok. Kegiatan belajar lebih banyak. Ada yang berlangsung pada waktu pagi, ada pula yang berlangsung pada waktu sore, dan ada pula yang berlangsung pada

waktu malam hari. Belajar di dayah lebih mandiri. Latihan lebih banyak. Seperti latihan berpidato, latihan dakwah, latihan berbicara, dengan bahasa Arab dan lain-lain. Latihan-latihan itu dilakukan supaya peserta didik lancar melakukan kegiatan-kegiatan dalam masyarakat. Pada waktu libur panjang bulan puasa dan pada bulan haji siswanya pulang kampung masuk kampung untuk mempraktekkan pengetahuannya.

7. Dayah Teuku Chik

   Dayah Chik merupakan perguruan tinggi Islam zaman dulu. Setiap kerajaan Islam di Aceh memiliki Dayah Chik tersebut. Jumlah dayah tinggi sejak dari tahun 840-1903 (Masehi) lebih 50 buah di seluruh Aceh. Kerajaan- kerajaan Islam tersebut antara lain:

   1) Kerajaan Islam Peurelak.
   2) Kerajaan Islam Tamiang.
   3) Kerajaan Islam Dayah.
   4) Kerajaan Islam Banda Aceh Darussalam.

3. Perkembangan Sistem Pendidikan di Indonesia Pada Masa Kolonialisme : Sebelum Politik Etis

Pada permulaan abad ke-16, bangsa Portugis adalah bangsa Eropa yang pertama datang ke Indonesia. Kemudian, tidak begitu lama disusul oleh bangsa Spanyol. Tujuan utama mendatangi Indonesia adalah mencari (berdagang) rempah-rempah yang banyak dihasilkan oleh Maluku. Perdagangan mereka makin maju dan makin banyak bangsa Portugis dan Spanyol yang datang ke Maluku. Di samping berdagang, mereka bertujuan menyebarkan agama Katolik.

Untuk tugas-tugas ini, didatangkan para misionaris. Fransiskus Xaverius, setelah menyelesaikan studinya di Sarekat Yesus, diberi tugas ke daerah- daerah timur Asia. Maka, ini juga tujuan beliau datang ke Maluku. Beliaulah yang dianggap sebagai peletak dasar agama katolik di Indonesia. Untuk menyebarkan agama Katolik itu, para misionaris mendirikan sekolah. Pada 1536, di Ternate didirikan sekolah yang mendidik calon-calon misionaris/pekerja agama.

Sekolah seminari ini juga didirikan di pulau Solor. Banyak anak-anak Indonesia yang masuk sekolah ini. Dengan adanya usaha- usaha sosial dari para misionaris, kehidupan orang-orang Maluku makin menjadi maju. Pada 1536, penguasa Portugis di Maluku bernama Antonio Galvano mendirikan sekolah-sekolah seminari untuk anak-anak dari pemuka-pemuka pribumi. Selain pelajaran agama, diajarkan juga mebaca, menulis, dan berhitung. Sekolah serupa didirikan di Pulau Solor, yang muridnya mencapai 50 orang. Sekolah ini diketahui memakai bahasa Latin. Murid-murid bumiputra yang ternyata dapat mengikuti dan ingin melajutkan, dapat melanjutkan studinya di Goa, pusat kekuatan Portugis di Asia. Sedangkan Fransiskus Xaverius pada 1547 pergi ke Goa dari Ternate dengan membawa pemuda-pemuda Maluku untuk melajutkan pendidikan di Goa.

Penyebaran agama Katolik di Kepulauan Maluku, demikian pula penyelenggara pendidikan, tidak banyak mengalami kemajuan yang berarti. Hal tersebut terjadi karena selain hubungan dengan orang0orang Portugis dengan Sultan Ternate kurang baik, mereka harus bersaing dan berperang melawan orang-orang Spanyol dan kemudian orang-orang Inggris. Akhirnya kedatangan Belanda dengan agama Kristen yang dibawanya dapat menghalau Portugis sampai ke Timor-Timur, kemudian mengambil alih segala harta benda, termasuk gereja Katolik beserta harta benda, termasuk gereja Katolik beserta lembaga pendidikannya walaupun sebagian penduduk masih juga ada yang setia kepada agama Katolik hingga sehigga.

Mulai abad ke-16, bangsa Barat, yaitu bangsa Portugis (abad ke-15), lalu disusul oleh bangsa Belanda, dan diselingi bangsa Inggris (1811-1816) datang ke Tanah Air. Tujuan mereka pertama kalinya adalah berdagang tapi lambat laun menjajah seluruh wilayah Indonesia. Penjajahan Belanda dalam perjalanan sejarahnya menunjukkan bagaimana ia menerapkan kebijakan pendidikan yang diskriminatif dan menghalangi pertumbuhan penduduk lokal sudah ada. Pada 1882, Belanda membentuk pristerrraden yang mendapat tugas mengawasi pengajaran agama di pesantren-pesantren. Pada tahun 1602, bangsa Belanda mendirikan perkumpulan dagang yang terkenal dengan nama VOC. Dengan berdirinya VOC ini, mereka melakukan monopoli perdagangan, tidak hanya rempah- rempah saja, tetapi hasil bumi Indonesia juga diperjualbelikan. VOC makin kuat dan besar pengaruhnya di seluruh Indonesia.

Bangsa Belanda yang beragama Kristen Protestan sambil berdagang juga menyebarkan agamanya. Konteks penyebaran agama itu menjadi permulaan kebijakan pendidikan kolonial Belanda. Sekolah-sekolah didirikan di Pulau Ambon dan Pulau Bacan (Maluku). Sekolah-sekolah ini belum mengjarkan pengetahuan umum. Bahasa pengantar yang dipakai ialah bahasa Melayu, baru pada kelas-kelas yang lebih tinggi dipakai bahasa Belanda. Pihak Belanda juga mendirikan sekolah-sekolah bagi calon pegawai VOC.

Pada 1799, VOC jatuh karena pegawainya bekerja tanpa disiplin, korupsi, dan manajemen morat-marit. Dengan cepat, pemerintah Belanda mengambil alih kekuasaan VOC. Mulailah negara kita di bawah kekuasaan pemerintah Belanda dengan nama Hindia-Belanda. Perlu disebutkan di sini bahwa meskipun sekolah-sekolah telah banyak berdiri, secara formal sekolah- sekolah tersebut tidak didirikan atas nama VOC, tetapi didirikan oleh orang- orang dari kalangan agama, yaitu agama Kristen Protestan. Dengan demikian, sekolah-sekolah itu mempunyai corak dan ciri-ciri Kristen. Kebanyakan sekolah yang ada baru berada pada tingkatan pendidikan dasar/rendah. Sebagai gambaran dapat disebutkan beberapa sekolah :

a. Di Ambon (1645) terdapat 33 sekolah dengan 1300 murid, pada 1708 meningkat menjadi 39366 murid.
b. Di daerah-daerah Maluku Utara/barat laut terdapat 39 sekolah dengan 1057 murid.
c. Pulau-pulau lainnya yang juga telah ada sekolah, seperti Pulau Timor (1710), Pulau Sawu (1756), Pulau Kei (1635), Pulau Kisar, Pulau Wetar, Pulau Damar, dan Pulau Letti (1700).
d. Di luar daerah Maluku pada zaman VOC baru ada sekolah di Batavia (Jakarta) yang berdiri sejak 1617.
e. Menjelang bubarnya VOC, sekolah-sekolah baru dapat didirikan lebih luas dan lebih banyak sehingga meliputi derah P. Jawa terutama di daerah pantai, Sumatra, dan Sulawesi (Ujung Pandang).

Sesudah VOC gulung tikar pada 1799, Indonesia menjadi daerah jajahan Belanda dengan nama Hindia-Belanda. Usaha-usaha pendidikan kolonial Belanda yang diajarkan di daerah Maluku tidak dapat meluas ke daerah lain, maka, pada saat pemerintahan

Hindia Belanda mulai dijalankan, pendidikan bagi bangsa Indonesia belum baik. Pada saat itu, Gubernur Daendels agak memerhatikan nasib bangsa kita. Ia (1801) telah menyatakan bahwa perlu diselenggarakan pengajaran bagi anak-anak Jawa(Indonesia) untuk memperkenalkan kepada anak-anak itu tentang kesusilaan, adat istiadat, dan pengertian agama-agama.

Akan tetapi, cita-cita Daendels tidak dapat direalisasi, berhubung tidak adanya anggaran untuk pengajaran bagi bangsa Indonesia. Saat itu penjajahan Belanda sempat berhenti atau berganti ketika dalam konteks internasional mereka dikalahkan inggris. Dan Inggris yang sempat menjadikan Indonesia sebagai jajahannya (1811-1816) juga belum sempat memberikan/ mengusahakan pendidikan. Baru setelah Belanda dpat merebut Indonesia kembali, keluarlah surat keputusan (koninklijk besluit 1848) yang isinya tentang penetapan anggaran belanja pengajaran bagi orang-orang Indonesia. Sementara itu 1884 keluar surat keputusan yang member kesempatan berdirinya sekolah swasta.

Konteks pendidikan dan pengajaran ini pada prinsipnya adalah untuk memenuhi kebutuhan pegawai rendahan di kantor-kantor pamong praja atau kantor-kantor yang lain. Pada abad ke-18, pendidikan dan pengajaran diberikan secara perseorangan. Pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19 sistem ini dirubah menjadi sistem klasikal dimana pengajaran diberikan kepada sekelompok anak-anak pada waktu yang sama dengan bahan pelajaran yang sama.

Pada permulaan 1850, didirikan sekolah Kelas I yang lamanya lima tahun. Sekolah ini disediakan pada anak-anak dari lingkungan pegawai Pamong Praja ditempatkan di kota-kota keresidenan. Mata pelajaran yang diberikan antara lain membaca, menulis, berhitung, menggambar, menyanyi, ilmu bumi, ilmu tumbuh-tumbuhan, ilmu hewan, ilmu alam, dan bahasa Indonesia. Kebutuhan administrasi memerlukan matapelajaran yang harus diajarkan disekolah-sekolah. Sehingga, dapat dikatakan bahwa Sekolah Kelas I mempunyai sifat sebagai pendidikan bagi calon pegawai. Tujuan pendidikan dan pengajaran waktu itu hanya diarahkan kepada pendidikan pegawai.

Akhir abad ke-19 didirikan sekolah Kelas II yang lamanya minimal empat tahun ditempatkan di Kota-kota Kabupaten. Pengajaran ini lebih sederhana daripada sekolah

Kelas I yaitu membaca, menulis, berhitung, dan bahasa daerah atau bahasa Indonesia. Sekolah ini untuk umum dan tidak dibatasi.

4. Perkembangan Sistem Pendidikan di Indonesia Pada Masa Kolonialisme : Sesudah Politik Etis

Paham Liberalisme ini sangat berpengaruh terhadap pendidikan di Hindia- Belanda seperti yang terjadi pada 1855, yaitu adanya instruksi kepada gubernur jenderal agar mengambil tindakan memperbaiki dan memperluas pendidikan bagi penduduk golongan Eropa dan Ilmu Pengetahuan mereka. Khusus bagi penduduk bumiputra, ditentukan agar di tiap kabupaten didirikan sekolah para remaja bumiputra. Pada 1867, dalam pemerintahan Hindia Belanda dibentuk suatu departemen tersendiri yang mengurusi masalah pendidikan, agama dan kerajinan yang disebut *Departement Van Onderwijs En Eeredienst* (Departemen Pengajaran dan Kepentingan Kehormatan). Tujuannya adalah agar penduduk bumiputra, cina dan golongan lainnya berkesempatan memperoleh pendidikan Barat sebagai dasar pendidikan sampai pendidikan tinggi. Melalui kebijakan pendidikan Politik Etis, orang-orang bumiputra harus diperkenalkan kebudayaan dan pengetahuan barat, sehingga Pemerintah Belanda banyak mendirikan sekolah- sekolah yang berorientasi barat. Pemerintah Belanda mendasarkan kebijakannya pada pokok-pokok pikiran sebagai berikut :

a. Pendidikan dan pengetahuan barat diterapkan sebanyak mungkin bagi golongan penduduk bumiputra. Bahasa Belanda diharapkan menjadi bahasa pengantar di sekolah-sekolah.
b. Pemberian pendidikan rendah bagi golongan bumiputra disesuaikan dengan kebutuhan mereka.

5. Perkembangan Sistem Pendidikan di Indonesia Pada Masa Kolonialisme : Bumiputera

Akibat dari penerapan Politik Etis, pemerintah Kolonial menganggap sebagai tugas pokok di lapangan Pendidikan adalah memberikan pengajaran rendah kepada bangsa Indonesia sesuai dengan kebutuhannya. Dalam rangka memperbaiki pengajaran rendah bagi bumiputra, maka tahun 1907 diambillah beberapa tindakan penting salah satunya

memberi corak dan sifat ke-Belanda-belandaan pada Sekolah Kelas I Sekolah Kelas I ini, dimasukkan bahasa Belanda sebagai Mata Pelajaran dan mulai diberikan sejak kelas 3 sampai dengan kelas 5. Setelah lama belajar di Sekolah itu dijadikan 6 tahun, maka di kelas 6 Bahasa Belanda itu dijadikan bahasa Pengantar. Akhirnya, pada tahun 1914 Sekolah Kelas I dijadikan HIS (Hollands Inlandse School) dan menjadi suatu bagian pengajaran rendah barat. HIS lebih banyak diminati oleh kaum bangsawan dan orang-orang terkemuka. Lajunya pergeseran pendidikan Bumiputra ke sifat barat makin didorong dengan munculnya beberapa tokoh liberal pembaharu, terutama Mr J.H. Abendanon dan A.W.F Idenburg. Abendanon membentuk banyak pusat kursus bahasa Belanda untuk membantu Sekolah Kelas I maupun Sekolah dasar Eropa (ELS). Dalam pembentukan sekolah ini, Abendanon sudah berhasil mengurangi uang sekolah bagi murid Bumiputra yang berminat belajar di ELS. Lewat sekolah ini, Abendanon juga merancang pendidikan Calon ibu yang baik bagi gadis jawa. Salah satunya adalah R.A Kartini yang memasuki Sekolah Dasar Eropa di Jepara.

6. Perkembangan Sistem Pendidikan di Indonesia Pada Masa Kolonialisme : Guru

Sistem magang ini diadakan di Sekolah Kelas II (Vervolg) dan dipimpin oleh Kepala Sekolah (Mantri Guru) yang dijadikan magang tersebut adalah mereka yang telah menamatkan Sekolah Kelas II. Sistem ini diakhiri dengan ujian, yang dinamakan Ujian PO (Premie Opleiding). Sistem magang ini berakhir pada tahun 1921. Beda antara kedua macam Hoofdacte itu terletak pada soal bahasa Belanda dan ilmu mendidik. Pada Eur. HA kedua macam mata pelajaran tersebut lebih diperberat syarat-syaratnya. Eur. HA lebih tinggi penghargaannya daripada Ind. HA.

7. Perkembangan Sistem Pendidikan di Indonesia Pada Masa Kolonialisme : Kejuruan

Untuk dapat mempertinggi bidang ekonomi rakyat, maka dilaksanakanlah pengajaran praktis. Sekolah ini berasal dari sekolah Pekerjaan Tangan (Hondwerk School) dan Sekolah Kerajinan Tangan (Njverheid School) yang pertama didirikan pada tahun 1881. sekolah ini berbahasa pengantar Belanda, sedangkan lama sekolah tiga tahun dan bertujuan untuk mendidik dan mencetak mandor (werkbaas). Selain itu, tahun

1904 diadakan percobaan dengan membuka Sekolah Kerajinan Tangan yang memberikan pelajaran mengukir dan menganyam. Sekolah itu berada dibawah pimpinan RMT. Oetoyo (Bupati Ngawi). Ketika itu sudah ada beberapa sekolah pertukangan yang didirikan oleh Zending di Mojowarno di tahun 1893.

Pengajaran teknik ikut berkembang karena disebabkan pada permulaan abad ke-20 perusahaan-perusahaan teknik dan industri makin diperluas. Sekolah ini merupakan kelanjutan dari Ambachts School, berbahasa pengantar Belanda dan lama sekolah tiga tahun. Maka didirikanlah Koningin Wihelmina School pada tahun 1906 di Jakarta yang terbagi atas 2 bagian, yaitu Bagian HBS 3 Tahun dan Bagian Teknik Pada tahun 1911 bagian HBS dapat berdiri sendiri, sehingga KWS menjadi Sekolah Teknik Pertama di Indonesia. Pada tahun 1912, didirikan Sekolah semacam itu di Surabaya dengan nama Koningin Emma School . Sekolah ini mempunyai jurusan Ilmu Bangunan, ilmu Pesawat dan Teknik Listrik. Sekolah-sekolah malam, Sekolah-sekolah ini didirikan pada tahun 1914 di Surabaya bagi mereka yang telah menamatkan HBS 3 tahun atau sederajat. Pada tahun 1926 ditambah satu lagi di Jakarta. Sekolah-sekolah Dagang Rendah, lama belajarnya adalah 3 tahun dan murid-muridnya berasal dari HIS atau ELS (Sekolah-sekolah Belanda). Sekolah Daganf Menengah, yang mulai dibuka di Jakarta tahun 1935. Syarat masuknya adalah memiliki ijazah Sekolah Mulo.

Lembaga keguruan ini merupakan lembaga tertua dan sudah ada sejak permulaan abad ke-19. Sekolah Guru Negeri yang pertama didirikan pada tahun 1851 di Surakarta, lalu sekolah itu dipindahkan ke Megelang tahun 1875.117 Sekolah ini pun lebih banyak ditempuh oleh anak-anak priyayi rendah daripada anak-anak regent. Sebelum itu, pemerintah telah menyelenggarakan kursus-kursus guru yang diberi nama Normal Cursus yang dipersiapkan untuk menghasilkan guru-guru Sekolah Desa. Pada abad ke-20 para kalangan penganjur politik etis mengemukakan gagasan mereka untuk segera membentuk Pendidikan Tinggi (Hooger Onderwijs). Akhirnya pada tahun 1910 didirikan Perkumpulan Universitas Indonesia (Indische Universiteits Veriniging) yang bertujuan untuk mendirikan pendidikan tinggi, baik melalui pemerintah maupun swasta.

8. Perkembangan Sistem Pendidikan di Indonesia Pada Masa Kolonialisme : Sekolah Tinggi

Lembaga keguruan ini merupakan lembaga tertua dan sudah ada sejak permulaan abad ke-19. Sekolah Guru Negeri yang pertama didirikan pada tahun 1851 di Surakarta, lalu sekolah itu dipindahkan ke Megelang tahun 1875.117 Sekolah ini pun lebih banyak ditempuh oleh anak-anak priyayi rendah daripada anak-anak regent. Sebelum itu, pemerintah telah menyelenggarakan kursus-kursus guru yang diberi nama Normal Cursus yang dipersiapkan untuk menghasilkan guru-guru Sekolah Desa. Pada abad ke-20 para kalangan penganjur politik etis mengemukakan gagasan mereka untuk segera membentuk Pendidikan Tinggi (Hooger Onderwijs). Akhirnya pada tahun 1910 didirikan Perkumpulan Universitas Indonesia (Indische Universiteits Veriniging) yang bertujuan untuk mendirikan pendidikan tinggi, baik melalui pemerintah maupun swasta.

Sekolah Tabib Tinggi atau Geneeskundige Hoge School (GHS) didirikan pada tahun 1927 di Jakarta. Lama belajar adalah 7 tahun. Pada tahun 1811 telah ada mantra-mantri cacar bangsa Indonesia. Untuk memenuhi kebutuhan akan mantra-mantri cacar yang lebih banyak, maka pada tahun 1851 dibukalah sebuah sekolah bagi calon-calon mantra cacar. Pendidikannya berlangsung 1 tahun lamanya dan kelak dijadikam 2 tahun dan yang lulus dari ujian sekolah ini akan mendapatkan gelar “dokter jawa”. Sekolah itulah yang disebut Sekolah Dokter Jawa. Lembaga pendidikan ini di Indonesia dimulai dari Sekolah Dokter Djawa yang didirikan pada tahun 1851. lama belajar dua tahun, setelah tamat dari sekolah dasar lima tahun. Bahasa pengantarnya adalah bahasa melayu dan pada tahun 1913 Sekolah Dokter Djawa diubah namanya menjadi School ter opleiding van indische Artsen (STOVIA). Pada tahun 1913 disamping STOVIA di Jakarta didirikan pula Nederlandsch Indische Artsenschool (NIAS) di Surabaya yang syarat dan lama belajarnya sama.

Pendidikan Tinggi Hukum dimulai dari Sekolah Hukum (Rechtsschool) yang didirikan pada tahun 1909. Sekolah ini menerima lulusan ELS dan lama pendidikan tiga tahun serta berbahasa pengantar bahasa Belanda. Rechtsschool itu terdiri dari 2 bagian yaitu bagian persiapan dan bagian pendidikan kejuruan yang masing-masing lamanya 3 tahun. Kemudian berdiri Sekolah Tinggi Hakim atau Rechtskundige Hoge School (RHS) dan didirikan pada tahun 1924 di Jakarta.

Dikalangan masyarakat Indonesia dewasa itu tampak adanya keraguan-keraguan, apakah pengajaran barat itu benar-benar dapat membawa bangsa Indonesia ke taraf hidup yang lebih tinggi. Mulailah timbul kesadaran, bahwa untuk memajukan bangsa Indonesia itu tidak cukup dengan hanya mendidik calon-calon pegawai dan calon-calon pemimpin yang berpendidikan tinggi. Karena itulah, maka perkumpulan Muhammadiyah pada tahun 1937 mendirikan di Yogya suatu jenis sekolah baru, yang dinamakan Inheemse Mulo. Sekolah itu adalah yang pertama sekali yang memberikan pengajaran lanjutan dengan memakai bahasa daerah (bahasa Indonesia) sebagai bahasa pengantar. Murid-murid yang diterima di sekolah itu adalah lulusan Sekolah Kelas II atau Sekolah Vervolg dan lama belajarnya adalah 4 tahun.

9. Perkembangan Sistem Pendidikan di Indonesia Pada Masa Kolonialisme : Masa Penjajahan Jepang

Setelah Belanda ditaklukkan oleh Jepang di Indonesia pada tanggal 8 Maret 1942, maka Belanda angkat kaki dari Indonesia. Semenjak itu mulailah penjajahan Jepang di Indonesia. Jepang muncul sebagai negara kuat di Asia. Bangsa Jepang bercita-cita besar menjadi pemimpin Asia Timur Raya. Sejak tahun 1940 Jepang berencana untuk mendirikan kemakmuran bersama Asia Barat Raya. Didorong semangat untuk mengembangkan pengaruh dan wilayah sebagai bagian dari rencana membentuk Asia Timur Raya yang meliputi Manchuria, Daratan China, Kepulauan Filiphina, Indonesia, Malaysia, Thailand, Indo China dan Rusia di bawah kepemimpinan Jepang, negera ini mulai melakukan ekspansi militer ke berbagai negara sekitarnya tersebut. Dengan konsep "Hakko Ichiu" (Kemakmuran Bersama Asia Raya) dan semboyan "Asia untuk Bangsa Asia", bangsa fasis inipun menargetkan Indonesia sebagai wilayah potensial yang akan menopang ambisi besarnya. Dengan konteks sejarah dunia yang menuntut dukungan militer kuat, Jepang mengelola pendidikan di Indonesia pun tidak bisa dilepaskan dari kepentingan ini. Sehingga dapat dikatakan bahwa sistem pendidikan di masa pendudukan Jepang sangat dipengaruhi motif untuk mendukung kemenangan militer dalam peperangan Pasifik.

Pada masa Belanda terdapat dua jenis pengajaran, yaitu pengajaran kolonial dan pengajaran Bumi Putra, oleh Jepang sistem seperti itu dihilangkan. Hanya satu jenis

sekolah rendah saja yang diadakan bagi semua lapisan masyarakat, yaitu: Sekolah Rakyat 6 Tahun atau "Kokumin Gakko". Sekolah-sekolah desa masih tetap ada dan namanya diganti menjadi Sekolah Pertama. Jenjang pengajaran pun menjadi:

a. Sekolah Rakyat 6 Tahun (termasuk Sekolah Pertama).
b. Sekolah Menengah 3 Tahun
c. Sekolah Menengah Tinggi 3 Tahun (SMA-nya pada Zaman Jepang)

10. Perkembangan Sistem Pendidikan di Indonesia Pada Masa Kemerdekaan (1945-1950)

Fokus utama pendidikan nasional ketika Indonesia lepas dari penjajahan yaitu mencerdaskan dan meningkatkan kualitas serta kemampuan bangsa. Tujuan sebenarnya dari pendidikan zaman kemerdekaan adalah untuk mengisi tata kehidupan dan pembangunan. Tujuan tersebut mengalami kendala, yaitu penjajah Belanda ingin menjajah kembali sehingga memaksa kita kembali berjuang secara politik dan fisik serta adanya kendala dari dalam yaitu pergolakan politik. Pendidikan pada masa kemerdekaan walaupun dalam keadaan sulit tetapi tetap mampu menghasilkan produk hukum tentang pendidikan, yaitu Undang- undang pendidikan Nomor 4 tahun 1950. Itulah produk hukum pendidikan Nasional pertama terlepas kemudian kita memandang bahwa produk hukum itu kurang terang memberikan definisi tentang konsep dan sistem pendidikan nasional.

Mohammad Yamin adalah menteri pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan, pada masa itu memberikan penerangan posisi pendidikan sebagai landasa pembangunan masyarakat indonesia secara nasional, artinya pendidikan harus mengangkat tata nilai sosial yang menjadi identitas bangsa dengan corak budaya, tradisi, bahasa, agama, ras, dan sukunya yang beragam untuk menggantikan sitem pendidikan warisan kolonial. Secara garis besar, pendidikan nasional adalah bentuk reaksi atas sistem pendidikan yang bersifat deskriptif dan elitis. Oleh karenanya tujuan pendidikan nasional adalah membentuk masyarakat yang demokratis.

Pada zaman kemerdekaan kondisi sosial politik sangatlah tidak stabil . maka dari itu hal demikian sangat berpengaruh mengenai pola dan dinamika pendidikan nasional saat itu, yaitu terjadi beberapa kali perubahan arah dan orientasi pendidikan nasional,

misalnya pada masa permulaan kemerdekaan. Melalui SK Menteri Pendidikan, pengajaran dan kebudayaan No. 104/Bhg. 0, tanggal 1 maret 1946, tujuan pendidikan berorientasi pada usaha menananamkan jiwa patriotisme dan lebih jauh dimaksudkan untuk menghasilkan patriot- patriot bangsa yang rela berkorban untuk bangsa dan negaranya.139 Undang- undang No. 4 tahun 1950 pasal 3, tujuan pendidikan nasional berubah yaitu dengan adanya perumusan tujuan pendidikan dan pengajaran (lihat lampiran).

11. Perkembangan Sistem Pendidikan di Indonesia Pada Masa Orde Lama (1950-1966)

Praktik pendidikan zaman Indonesia merdeka sampai tahun 1965 bisa dikatakan banyak dipengaruhi oleh sistem pendidikan Belanda. Praktek pendidikan selepas penjajahan menekankan pengembangan jiwa patriotisme. Pada masa ini, lingkungan politik terasa mendominir praktek pendidikan. Upaya membangkitkan patriotisme dan nasionalisme terasa berlebihan, sehingga menurunkan kualitas pendidikan itu sendiri. Kebijaksanaan politik pendidikan para menteri yang bertugas antara tahun 1945-1950 dapat dikatakan belum bisa dirasakan atau belum terlihat hasilnya. Penyelenggaraan pendidikan agama setelah Indonesia merdeka mendapat perhatian serius dari pemerintah, baik di sekolah Negeri maupun Swasta. Secara umum pendidikan orde lama sebagai wujud interpretasi pasca kemerdekaan di bawah kendali kekuasaan Soekarno cukup memberikan ruang bebas terhadap pendidikan. Pemerintahan yang berasaskan sosialisme menjadi rujukan dasar bagaimana pendidikan akan dibentuk dan dijalankan demi pembangunan dan kemajuan bangsa Indonesia di masa mendatang. Berdasarkan intsruksi Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan No. 2 tanggal 17 Agustus 1961, diadakan perincian yang lebih lanjut mengenai Pantja Wardhana/Hari Krida. Untuk menyesuaikan kebijakan pendidikan dengan Manipol diinstruksikan sebagai berikut :

a. Menegaskan Pancasila dengan Manipol sebagai pelengkapnya sebagai asas pendidikan Nasional.
b. Menetapkan Panca Wardhana sebagai sistem pendidikan yang berisi prinsip-prinsip Perkembangan cinta bangsa dan tanah air, moral nasional/ internasional/keagamaan. Perkembangan kecerdasan. Perkembangan emosional artistik atau rasa keharuan dan keindahan lahir batin. Perkembangan kerajinan tangan. Perkembangan jasmani

Menyelenggarakan “hari krida” atau hari untuk kegiatan-kegiatan lapangan kebudayaan, kesenian, olahraga, dan permainan pada tiap-tiap hari Sabtu.

12. Perkembangan Sistem Pendidikan di Indonesia Pada Masa Orde Baru

Menurut pemerintahan Orde Baru, perlu menyelenggarakan pendidikan rehabilitas kesadaran berideologi bagi mereka yang pernah menyeleweng terhadap Pancasila. Orde Baru identik dengan ideologi atau slogan pembangunan. Begitu pula arah dan kebijakan pendidikan disesuaikan dengan gerakan pembangunan. Kata pembangunan didahulukan sebelum Pancasila. Ini menandakan bahwasanya pembangunan walaupun tidak secara resmi dijadikan ideologi, tapi menjadi pijakan dasar Orde Baru dalam mengarahkan jalannya pemerintahan dan pendidikan selain Pancasila. Kurikulum 1984 mengusung “process skill approach” yaitu proses menjadi lebih penting dalam pelaksanaan pendidikan, namun tujuan tetap faktor penting. Peran siswa dalam kurikulum ini menjadi mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA) atau Student Active Leaming (SAL).

13. Perkembangan Sistem Pendidikan di Indonesia Pada Masa Orde Reformasi

Perkembangan pendidikan di Indonesia pada masa Reformasi sangat dipengaruhi oleh perubahan konstitusi yag menjadi salah satu agenda reformasi. Lembaga ilmiah, seperti kampus perguruan tinggi, dibebaskan dan intervensi dan pengaruh luar. Kebijakan pendidikan lain di permulaan masa reformasi, yaitu persoalan otonomi perguruan tinggi. Pemerintahan Megawati mengasilkan RUU Sisdiknas yang kemudian menjadi UU Sisdiknas. Perubahan kurikulum juga mewarnai perjalanan sejarah pendidikan Indonesia pada masa reformasi. Pendidikan yang berbasis keagamaan juga mendapat perhatian khusus pada masa reformasi. Secara kelembagaan pendidikan keagamaan berada dibawah kementerian agama, berbeda dengan pendidikan umum yang berada di bawah kementerian pendidikan.

B. Pengertian Reformasi Pendidikan Nasional

Reformasi secara etimologi berasal dari kata formasi, yang berarti susunan atau bentuk susunan instansi. Pendidikan yaitu pengetahuan tentang mendidik. Nasional yaitu yang

berkenaan dengan bangsa sendiri. Reformasi berarti perubahan radikal untuk perbaikan dalam bidang sosial, politik atau agama dalam suatu masyarakat atau negara. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan pada peraturan negara tersebut, misalkan di negara Indonesia berarti pendidikan nasional Indonesia adalah pendidikan yang berdasarkan pada pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Menurut David D. Curris (2000), mengemukakan ada empat strategi mayor dalam reformasi pendidikan, yaitu:

1. Akuntabilitas berbasis standar

   Dengan menetapkan standar pengeluaran yang jelas, serta pengujian secara sistematik atas kemajuan siswa, berupa statement kepercayaan dimana guru dan siswa akan di dorong pada fokus usaha pembelajaran dan arah yang benar. Ada lima elemen kunci akuntabilitas berbasis standar, yaitu:

   a. Standar isi yang padat dan dapat dimengerti;
   b. Instrument pengujian yang valid sesuai dengan standar yang ditetapkan;
   c. Pengembangan professional sebagai kunci utama pencapaian standar itu;
   d. Pelaporan hasil secara tepat waktu, akurat dan dapat dimengerti;
   e. Ketepatan ganjaran, sanksi, dan bantuan yang ditargetkan;

2. Reformasi sekolah secara menyeluruh

   Bentuk kebijakan yang hanya memacu target spesifik, struktur, dan metode-metode instruksional yang kaku. Reformasi pendidikan persekolahan yang berpijak pada serba keterbatasan, hanya memilih cara termudah dan termurah dalam pengalokasian sumber-sumber, dan dukungan politik yang minim, maka hasil yang akan dicapai tidak lebih bersifat terfragmentasi dan temporal. Karena itulah, usaha-usaha kekinian dimaksudkan untuk mencapai reformasi sekolah secara menyeluruh. Untuk hal ini diperlukan investasi yang mahal, dan perumusan kebijakan dilakukan dengan berbasis kepada hasil-hasil penelitian, pendekatan komprehensif, terkoordinasi, target-target pencapaian yang terukur, dan dukungan yang kuat di tingkat sekolah.

3. Strategi pasar

Sebagai perantara sosial yang menawarkan jasa layanan yang bersifat intelektual, afeksi, psikomotorik, emosional, dan spiritual. Untuk merenspons kebutuhan dan tuntutan masyarakat yang semakin bervariasi, sekolah-sekolah harus dapat tampil secara difernsiatif, memiliki keunggulan yang berbeda dibandingkan dengan sekolah lain. Keunggulan-keunggulan dimaksud menyangkut satu atau beberapa bidang, seperti akademik, ekstrakurikuler, tenaga pengajar, kedisiplinan, bangunan fisik, elitis, pemberian beasiswa, dan lain-lain. Termasuk dalam skema unggulan ini adalah kemampuan sekolah menyediakan semacam voucher atau beasiswa bagi anak-anak yang dikategorikan kurang beruntung karena kemiskinan, yatim piatu, diabaikan oleh keluarga, terisolasi secara geografis, dan lain- lain.

4. Pembuatan keputusan yang bersifat demokratis atau pelimpahan kewenangan

Keputusan partisipatif merupakan strategi sistematis yang berfokus kepada pemberdayaan guru dan administrator di tingkat sekolah. Rasionalnya, adalah masyarakat mengetahui bahwa siswa-siswa terbaik mempunyai otonomi untuk berkreasi dan mengimplemantasikan program- program secara responsive. Pendekatan ini dilakukan dengan variasi nama, dari manejemen berbasis sekolah ke pembuatan keputusan secara partisipatif, dengan fokus utama lebih pada proses daripada produk khusus dari reformasi.

Empat strategi ini diharapkan dapat menjadi agenda reformasi dalam merumuskan kebijakan pendidikan di Indonesia. Reformasi pendidikan secara sederhana dapat diartikan sebagai terjadinya perubahan mendasar ke arah yang lebih baik, mengingat selama ini keberadaan pendidikan tidak jarang menjadi alat politis, yang akhirnya merugikan dunia pendidikan itu sendiri. Jadi reformasi pendidikan nasional adalah perubahan radikal yang ada dalam suatu instansi pendidian yang berada dalam naungan suatu negara kebangsaan.

C. Asumsi Pelaksanaan Reformasi Pendidikan Nasional

1. Pendidikan adalah sesuatu yang menetap

Selama ini Nampak bahwa betapa pendidikan telah diredusir sebagai proses untuk lulus UN (Ujian Nasional) dan ujian masuk perhuruan tingginegeri (SBMPTN, SNMPTN, dan jalur Mandiri) tetapi tidak diarahkan kepada pembentukan masyarakat yang bermoral dan beradab. Sesuai dengan UUD 1945 pendidikan seharusnya mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini berarti pendidikan adalah usaha untuk memberdayakan manusia. Manusia yang berdaya adalah manusia yang dapat berfikir kreatif, yang mandiri, dan yang dapat membangun dirinya dan masyarakatnya yang diiringi dengan nilai-nilai moral yang tinggi yang diperoleh dan telah ada sejak dulu dan merupakan warisan dari nenek moyang yang tidak boleh lepas dari kehidupan, walaupun arus teknologi dan globalisasi semakin cepat, tetapi ada satu hal yang tidak boleh hilang yaitu moral yang dapat diperoleh dari proses pendidikan.

2. Pendidikan adalah sesuatu yang berubah

Kehidupan global dalam dunia terbuka dengan perdagangan bebas serta kerjasama regional memerlukan manusia-manusia yang berkualitas. Manusia yang berkualitas adalah manusia yang bisa bersaing di dalam arti yang baik. Di dalam persaingan diperlukan kualitas individu sehingga hasil karya atau produk-produk yang dihasilkan dapat berkompetisi yang berarti mendorong ke arah kualitas yang semakin lama semakin meningkat. Kualitas yang baik dan terus menerus meningkat hanya dapat diciptakan oleh manusia-manusia yang mempunyai kemampuan berkompetisi dengan jalan memberikan pendidikan yang kondusif bagi lahirnya pribadi-pribadi yang kompetitif, tetapi bukan berarti pribadi yang egoistik.

3. Pendidikan adalah sesuatu yang menetap dan sesuatu yang berubah

Kehidupan global akan melahirkan kebudayaan global, lihat saja kepada berbagai bentuk life style yang mulai melanda kehidupan generasi muda terutama di kota-kota besar. Cara hidup global, tontonan global, makanan global, cita rasa global telah memasuki kehidupan masyarakat kita. Di satu pihak budaya global dapat membuka horizon pemikiran anggota masyarakat, tetapi juga kemungkinan masuknya unsur-unsur kebudayaan asing akan meracuni kehidupan generasi muda kita. Tugas pendidikan nasional adalah mengembangkan identitas peserta didik agar supaya dia bangga menjadi bangsa Indonesia yang penuh percaya diri memasuki kehidupan global sebagai seorang yang berbudaya. Pendidikan memang bukan hanya bertujuan menghasilkan manusia

yang pintar dan terdidik tetapi yang penting adalah manusia yang terdidik dan berbudaya (educated and civilized human being). Artinya, kita tetap mengikuti perkembangan zaman dan nilai-nilai moral tidak ditinggalkan, tetapi dijadikan pegangan dan pengikat dalam menyaring dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan IPTEK dan dunia global. Dari kenyataan yang ada terdapat kecenderungan untuk melakukan perubahan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi, dan lain-lain.

D. Tendensi Reformasi Pendidikan Nasional

Sebuah proses reformasi tentu akan memberikan dampak perubahan bagi sistem pendidikan yang sedang berjalan. Dampak perubahan dapat membawa variasi sistem pendidikan yang semakin baik, namun terkadang juga dapat menimbulkan berbagai persoalan baru. Reformasi pendidikan nasional pada intinya selalu mengacu pada dasar pendidikan nasional yaitu UUD 45 dan dasar negara, Pancasila. Pada prakteknya dapat diamati adanya beberapa tendensi (kecenderungan) arah reformasi pendidikan nasional yang dilihat dari aspek perubahannya terhadap sistem pendidikan Indonesia, yaitu:

1. Adanya reformasi di bidang kurikulum dan program-program belajar di institusi pendidikan.
2. Perubahan berfokus pada perombakan kurikulum secara terus menerus yang mengarah pada inovasi dan distribusi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Alam (SDA) yang merata.
3. Materi ajar dan metode pembelajaran senantiasa berkembang dengan mengadopsi teori-teori belajar dan pembelajaran dari luar yang terbukti efektif.
4. Reformasi menghasilkan berbagai kebijakan-kebijakan baru yang harus diikuti oleh kesiapan sumber daya dan sumber daya manusia yang siap. Reformasi pendidikan nasional kita seyogyanya didasarkan atas pertumbuhan yang komprehensif meliputi antara lain: ekonomi, politik, lapangan kerja, geografis, penemuan-penemuan ilmiah kemudian sosial outlock dan nilai- nilai kehidupan.
5. Berfokus pada pembangunan pendidikan yang komprehensif, termasuk penyediaan sarana prasarana institusi pendidikan, alokasi bantuan dana pendidikan, hingga pemberian tunjangan kesejahteraan pada guru.

E. Dasar Reformasi Pendidikan Nasional

Perubahan sistem pendidikan sebagai dampak reformasi pendidikan, harus selalu diarahkan untuk mencerminkan adanya demokratisasi dalam pendidikan nasional. Secara substansial perubahan atau reformasi itu dilakukan atas dasar:

1. Undang-undang pendidikan nasional, yaitu koreksi dan perbaikan atas undang-undang pendidikan nasional yang ada.
2. Reformasi atas sistem dan komponen sistem nasional dalam menterjemahkan undang-undang secara rinci dan jelas dalam sistem pendidikan nasional.
3. Reformasi dalam pelaksanaan pendidikan nasional menggambarkan konsistensi perilaku pendidikan dengan undang- undang pendidikan dan konsep dalam pendidikan nasional yang ada.

F. Implementasi Reformasi Pendidikan Nasional

Pendidikan sebenarnya selalu didesain untuk senantiasa berusaha menjawab kebutuhan dan tantangan yang muncul di kalangan masyarakat sebagai konsekuensi dari suatu perubahan. Tetapi pada kenyataannya, kondisi "pendidikan kita masih melahirkan mismatch yang luar biasa dengan tuntutan dunia kerja. Kondisi seperti ini juga berarti bahwa daya saing kita secara global amat rendah. Apabila kita merenungkan kondisi sekarang ini, dengan munculnya kekerasan, masyarakat bertindak menghakimi sendiri, dan berbagai macam bentuk perilaku kekerasan, menggambarkan bangsa ini sedang sakit.

Nampaknya ada sesuatu yang "salah" dari reformasi, apakah sistem pendidikan yang "salah" karena hanya "membentuk" manusia- manusia yang tidak "mampu", menjadi beban dan brutal, ataukah merupakan akses dari kebijakan dan praktek pendidikan di masa rezim orde baru yang otoriter telah melahirkan sistem pendidikan yang tidak mampu melakukan pemberdayaan masyarakat secara efektif. Walaupun secara kuantitatif rezim ini memang telah mampu menunjukkan prestasi yang cukup baik dibidang pendidikan. Patut diakui kemajuan-kemajuan pendidikan secara kuantitatif bisa kita rasakan selama orde baru. Namun keberhasilan kuantitatif ini belum terlihat pemberdayaan masyarakat secara luas sebagai cermin dari keberhasilan suatu sistem pendidikan, dan tidak pernah terjadi. "Mengapa demikian? Karena orde baru, setelah lima tahun pertama berkuasa, secara sistematis telah menyiapkan skenario pemerintahan yang memiliki visi dan misi utama

untuk melestarikan kekuasaan dengan berbagai cara dan metode. Akibatnya, sistem pendidikan kemudian dijadikan sebagai salah satu instrumen untuk menciptakan safetynet bagi pelestarian kekuasaan.

Visi dan misi pelestarian kekuasaan itu, melahirkan kebijakan pendidikan yang bersifat straight jacket. Pendidikan produk orde baru belum bisa diharapkan untuk membangun dan memberdayakan masyarakat, karena pendidikan yang berjalan pada masa orde baru dan produknya dapat dirasakan sekarang ini, sebatas pada sosialisasi nilai dengan pola hafalan dan kreativitas dipasung. Menurut Tilaar, bahwa "sistem pendidikan nasional sangat erat kaitannya dengan kehidupan politik bangsa pada saat itu.

Maka selama orde baru telah tercipta suatu hidupan bangsa yang tidak sesuai dengan cita-cita UUD 1945. Pemerintah orde baru yang represif telah menghasilkan manusia-manusia Indonesia yang tertekan, tidak kritis, bertindak dan berpikir dalam acuan suatu struktur kekuasaan yang hanya mengabdi kepada kepentingan sekelompok kecil rakyat. Indonesia patut diakui, bahwa produk pendidikan orde baru, masih berpengaruh sampai sekarang ini.

G. Kondisi Reformasi Pendidikan Di Indonesia

1. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar.
3. Meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral.
4. Meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, ketrampilan, pengalaman, sikap dan nilai berdasarkan standar nasional dan global.
5. Memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

H. Implikasi Permasalahan Reformasi Pendidikan Nasional

Setiap perubahan, sewajarnya akan selalu membawa dampak dan konsekuensi. Besar atau kecilnya resiko, bukanlah masalah yang berarti asalkan sudah diantisipasi dan dipersiapkan dengan baik. Oleh sebab itu, reformasi pendidikan perlu diikuti dengan adanya kesiapan:

1. Biaya pendidikan yang mencukupi, baik untuk mendukung pelaksanaan pendidikan maupun bagi pengadaan sarana/fasilitas pendidikan.
2. Sistem pengelolaan pendidikan yang efektif, efisien, dan memiliki kesiapan sumber daya manusia yang baik, sehingga konsep baru dapat diaplikasikan secara optimal.
3. Kualitas, loyalitas, dan mindset tenaga pendidik yang siap menerima perubahan.
4. Pemerataan akses informasi hingga ke daerah-daerah.
5. Tersedianya kemantapan konsep, yang diikuti dengan sosialisasi dan pendampingan.

Dampak dari sebuah perubahan tidak mungkin dapat dihindari, berikut ini beberapa dampak atau implikasi permasalahan yang muncul sebagai akibat dari adanya reformasi pendidikan nasional:

1. Pendidikan lebih berorientasi pada pembentukan aspek kognitif dan mengabaikan perkembangan aspek kepribadian siswa.
2. Adanya perubahan kurikulum mengakibatkan ketidak jelasan tujuan pendidikan serta kekaburan landasan pendidikan yang ingin dicapai.
3. Ditemukannya ketidaksesuaian kurikulum dengan kebutuhan zaman dan kebutuhan masyarakat.
4. Kesenjangan pendidikan yang ada di kota dengan yang ada di daerah, misalnya dalam hal sarana prasana dan ketersediaan tenaga pendidik yang profesional.

I. Solusi Permasalahan Reformasi Pendidikan Nasional

1. Diperoleh pemerataan yang efektif untuk memecahkan berbagai masalah reformasi pendidikan nasional, antara lain:
2. Pajak pendidikan merupakan salah satu sumber biaya pendidikan yang perlu dikelola dengan baik.
3. Perlu suatu deferesiensi pengolaan pendidikan sebelum menuju desentralisasi sistem pendidikan.

4. Meningkatkan penggunaan jasa bagi pemerataan dan kesempatan memperoleh pendidikan.
5. Diperlukan in-service training yang efektif untuk meningkatkan kompetensi tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan.

BAB II :
BUDAYA NASIONAL SEBAGAI DASAR PENDIDIKAN

A. Pengertian Pendidikan dan Budaya

Sejak didirikan atas kebudayaan nasional dinyatakan oleh K.H. Dewantoro bahwa pendidikan nasional harus disesuaikan atas kebudayaan nasional Indonesia. Terdapat beberapa asumsi yang perlu ditunjukkan adalah sebagai berikut :

1. Pendidikan adalah suatu proses pewarisan budaya (*Culture Heritage*)

   Salah satu kodrat manusia yang tidak dimiliki oleh binatang adalah kemampuannya untuk mempertahankan dan melangsungkan hidupnya melalui kebudayaan yang diciptakannya. Para ahli antropologi berpendapat bahwa kemampuan manusia menciptakan kebudayaan bersamaan dengan lahirnya generasi nenek moyang manusia pada sekitar 800.000 tahun yang lalu. Tumbuh dan berkembangnya kebudayaan manusia, diwariskan dari satu generasi kegenerasi berikutnya secara berkesinambungan. Kebudayaan bangsa yang kita miliki sekarang juga tidak terlepas dari proses pewarisan budaya yang terus menerus berlangsung sejak dulu. Dalam proses pewarisan budaya ini setiap individu mengalami pembentukan sikap melalui proses pembelajaran, sehingga segala tingkah laku ataupun perbuatannya dapat ia sesuaikan dengan budaya yang dianut oleh kelompoknya atau masyarakatnya.

2. Pendidikan akan membuat manusia menjadi manusia budaya

   Ahli antropologi seperti Geertz menyatakan bahwa manusia adalah makhluk yang terkungkung dalam jaringan arti yang diciptakannya sendiri. Maknanya bahwa manusia tidak dapat menjadi dewasa apabila dia tercabut dari masyarakatnya yang mempunyai kebudayaannya sendiri. Namun demikian, manusia bukanlah semata-mata hasil kungkungan nilai-nilai kebudayaannya. Kreatifitas, inovasi, enkulturisasi dan akulturisasi di dalam transmisi kebudayaan menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk yang aktif, kemampuan tersebut merupakan hasil dari proses pendidikan. Hal ini berarti bahwa

apabila proses pendidikan tidak melahirkan manusia-manusia yang kreatif dan kritis maka jaringan arti yang ditenunnya semakin lama semakin kaku dan kadaluarsa serta akhirnya mati. Kebudayaan yang hidup dengan demikian berarti mempunyai praksis pendidikan yang kreatif. Dengan kata lain, kebudayaan tidak terlepas dari proses pendidikan, sebagaimana proses pendidikan itu sendiri tidak terlepas dari jaringan kebudayaan.

3. Dengan budaya manusia dapat mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya

   Pada dasarnya kebudayaan dalam masyarakat merupakan perwujudan atau abstraksi dari perilaku manusia, sedangkan perilaku manusia dibentuk melalui kepribadian. Hal ini berarti, kepribadian merupakan latar belakang dari perilaku yang ada dalam diri seseorang atau individu. Walaupun kepribadian setiap individu dalam suatu masyarakat akan berbeda dengan kepribadian individu lainnya, tetapi setiap masyarakat mempunyai pola perilaku yang berlaku umum. Apabila diperhatikan kebiasaan-kebiasaan masyarakat di dunia ini akan dijumpai perilaku-perilaku yang disatu masyarakat dianjurkan tetapi dimasyarakat lain dilarang. Terdapat banyak contoh hidup yang membuktikan betapa besarnya pengaruh kebudayaan terhadap perilaku seseorang serta kepribadian yang terdapat dibaliknya. Dengan pemahaman kita tentang budaya yang beragam, maka masalah-masalah yang muncul dalam kehidupan manusia utamanya yang berkaitan dengan pola hidup, nilai dan moral setidaknya dapat diatasi. Tilaar mengemukakan keterkaitan yang sangat erat antar pendidikan dan kebudayaan. Bahkan kaitan keduanya adalah kaitan ontologis dan epistomologis. Dalam rangka lahirnya etno-nasionalisme, keterkaitan antara pendidikan dan kebudayaan akan semakin menonjol. Didalam praksis pendidikan untuk pengembangan sikap toleransi dalam masyarakat demokratis terdapat berbagai model pendidikan untuk kesadaran dan pengembangan kohesi sosial, yaitu pendidikan multi-kultural, pendidikan trans-kultural, dan pendidikan inter-kultural. Pendidikan inter-kultural ditekankan kepada eksistensi budaya- budaya atau sub-budaya yang ada. Dalam rangka pengembangan kohesi sosial maka yang diperlukan ialah kegiatan interaksi budaya. Bentuk yang lain ialah trans-kultural yang mencari bentuk-bentuk universalitas dari budaya-budaya yang ada. Model trans-kultural ini barangkali yang telah kita gunakan didalam praksis pendidikan selama orde baru. Bagi masyarakat

Indonesia dalam rangka otonomi daerah, model yang tepat ialah pendidikan multi-kultural. Artinya masing-masing budaya etnis yang ada didalam masyarakat mendapatkan kesempatan yang seluas- luasnya untuk berkembang. Didalam pengembangan tersebut tidak ada campur tangan pemerintah, tetapi sepenuhnya menjadi urusan masyarakat pemiliknya. Pemerintah hanya menjaga supaya tidak menjadi benturan budaya yang merugikan. Pemerintah mempunyai tugas menjaga terjadinya perkembangan budaya yang alamiyah dan kemungkinan terjadinya akulturasi atau pengembangan budaya seperti yang dikemukan oleh Levi-Strauss. Didalam model trans-kultural ada kemungkinan pemerintah mempunyai keinginan untuk memaksakan adanya unsur-unsur yang universal yang harus dilaksanakan oleh semua budaya etnis. Didalam model inter-kultural yang dipentingkan bukannya perkembangan sub budaya itu sendiri, tetapi bagaimana menjadi interaksi antar sub-budaya sehingga tidak terjadi ketegangan-ketegangan.

B. Konsep Budaya Nasional sebagai Dasar Pendidikan

Budaya nasional terdapat dua aliran/anggapan yang berbeda yaitu :

1. Teori elemen

   Teori elemen ini budaya nasional itu adalah kumpulan/himpunan dari unsur budaya daerah lokal.

2. Teori gestalt

   Menurut teori ini budaya nasional itu adalah sesuatu yang merupakan wujud keseluruhan dari budaya lokal/daerah itu.

Kedua teori tersebut sesungguhnya memiliki kelemahan tersendiri yaitu: Teori elemen, semua unsur budaya lokal meskipun turut menjalin ikatan massal ke dalam budaya nasional. Teori gestalt, menjadi baru dari sesuatu keselamatan dapat menghasilkan sesuatu yang asing atau sesuatu yang turut memiliki jiwa/semangat nasional. Barangkali teori yang lebih sesuai untuk apa yang disebut budaya nasional itu adalah teori dinamisme elemen yaitu budaya nasional adalah keseluruhan dari unsur budaya daerah yang dinamis. Contoh: Istilah atau hal dari bahasa daerah yang dinamis (populer, tepat, efisien, dan sebagainya), akan diaset menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Budaya Nasional sebagai dasar

pendidikan itu harus mencerminkan semua komponen sistem pendidikan termasuk pada proses dan hasil pendidikan.

C. Keterkaitan Antara Pendidikan dan Kebudayaan

Interelasi antara pendidikan dan kebudayaan menjadi topik yang sangat menarik. Pertama karena pendidikan telah direduksikan sebagai pembentukan intelektual semata-mata. Seperti kita tetapi meliputi berbagai segi kehidupan manusia termasuk teknologi, seni sastra dan musik, olahraga dan macam-macam lagi manifestasi kebudayaan yang dikenal manusia. Ketahui bahwa kehidupan manusia bukan hanya kehidupan intelektual saja. Di negara manapun budaya nasional selalu dijadikan dasar pendidikan nasional sejak awal kemerdekaan nasional pendidikan nasional. Sejak didirikan atas kebudayaan nasional dinyatakan oleh K.H. Dewantoro bahwa pendidikan nasional harus disesuaikan atas kebudayaan nasional Indonesia. Seperti apakah kebudayaan nasional itu? Macam apa pendidikan yang disesuaikan oleh kebudayaan nasional itu. Hal ini akan kita bahas lebih jauh.

D. Konsepsi Budaya Nasional

1. Budaya nasional sebagai dasar pendidikan itu harus mencerminkan semua komponen sistem pendidikan termasuk pada proses dan hasil pendidikan.
2. Budaya adalah karya dan hasil cipta manusia dalam mengubah alam ini.
3. Pendidikan hanya dapat berbeda bila dilihat dari sudut yang berbeda. Dari sudut pendidikan budaya adalah :
    a. Segala sesuatu yang terjadi sebagai hasil belajar.
    b. Segala sesuatu yang menjadi berencana kebiasaan atau tradisi yang tepat dalam masyarakat.
    c. Segala sesuatu yang hendak disesuaikan adalah dari generasi yang lebih tua kepada generasi yang lebih muda.

E. Fungsi dan Nilai-Nilai Budaya Nasional sebagai Dasar Pendidikan

Fungsi budaya dalam pendidikan diantaranya :

1. Pengembangan: pengembangan potensi peserta didik untuk menjadi pribadi berperilaku baik, ini bagi peserta didik yang telah memiliki sikap dan perilaku yang mencerminkan budaya dan karakter bangsa;
2. Perbaikan: memperkuat kiprah pendidikan nasional untuk bertanggung jawab dalam pengembangan potensi peserta didik yang lebih bermartabat; dan
3. Penyaring: untuk menyaring budaya bangsa sendiri dan budaya bangsa lain yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa yang bermartabat.

F. Implementasi Budaya Nasional sebagai Dasar Pendidikan

Implementasi budaya nasional sebagai Dasar Pendidikan :

1. Manusia ideal yang dicita-citakan masyarakat adalah gambaran manusia budaya seperti dalam budaya nasional dan perbaikan dalam tujuan akhir pendidikan nasional.
2. Tujuan akhir pendidikan seperti yang dikemukakan itu harus pula tercermin dari manusia dinamis.
3. Isi pendidikan dapat memberikan semua pengetahuan teknologi dan nilai yang tidak bertentangan dengan budaya inti bangsa Indonesia.
4. Budaya inti harus dapat menyelisir seluruh isi pendidikan.
5. Proses pendidikan harus mencerminkan perilaku manusia budaya Indonesia sehingga sikap dan arti adalah teaching itu mencerminkan hidup budaya nasional Indonesia.

G. Implikasi Masalah dan Solusi

Beberapa implikasi yang dapat timbul antara lain :

1. Menjadikan budaya lokal sumber yang dinamis/positif sebagai aset/isi pendidikan nasional.
2. Mengenai budaya luar yang ditemui dan dapat mempengaruhi pendidikan nasional.
3. Mencegah pengaruh budaya lokal tertentu yang memerlukan budaya nasional.

Beberapa solusi yang perlu dipertimbangkan antara lain :

1. Bahasa Indonesia tetap menjadi bahasa kebersamaan dan bahasa pengantar dalam sistem persekolahan.
2. Budaya daerah/lokal seperti bahasa daerah, kesenian daerah, adat istiadat dan sebagainya adalah bagian dari isi pendidikan nasional dalam bentuk muatan lokal.
3. Adapun pendidikan yang datang dari luar (budaya asing) harus melalui proses seleksi dan adaptasi.

BAB III :
WAJIB BELAJAR DALAM SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

A. Asumsi Dan Tendensi Wajib Belajar

Negara manapun wajib belajar (compulary education) merupakan salah satu komponen sistem pendidikan nasionalnya. Wajib belajar dalam sistem pendidikan nasional dianggap penting dan mendasar karena wajib belajar itu dipandang sebagai wadah pendidikan yang paling demokratis. Pada pendidikan tingkat wajib belajar itulah terjadi pemerataan pendidikan yang benar-benar merata dimana semua warga negara berkesempatan menikmati pendidikan itu, tingkat dan lama wajib belajar itu tidaklah sama pada semua negara. Dalam sistem pendidikan nasional kita dewasa ini wajib belajar berlangsung 9 tahun. Namun kecenderungan dan realitasnya konsep wajib belajar itu belum dapat terlaksana seperti yang diharapkan. Kondisi yang dialami negara kita dewasa ini menentukan dan mewarnai pelakasanaan wajib belajar itu. Untuk membahas wajib belajar itu perlu dipertimbangkan beberapa asumsi berikut ini:

1. Pendidikan adalah hak setiap warga negara Indonesia.
2. Oleh karena pendidikan adalah hak setiap warga negara maka kewajiban pemerintah dalam memberikan hak pendidikan rakyat itu dari konsep dan pelaksanaan.
3. Wajib belajar harus sesuai dengan kondisi hidup berbangsa dan bernegara. Gerakan wajib belajar memperjuangkan agar setiap orang menikmati kesempatan belajar. Salah satu bentuk dari kegiatan belajar itu dengan mewajibkan belajar setiap orang terutama anak-anak usia sekolah. Dalam hal ini ada suatu kegiatan, mewajibkan belajar walaupun tidak harus ke sekolah.

Untuk memahami apa itu wajib belajar ada beberapa konsepsi yang harus kita ketahui, yaitu :

1. Wajib belajar adalah pendidikan yang harus diikuti oleh setiap warga negara yang telah dan sampai berumur tertentu itu wajib hukumnya untuk melanjutkan pendidikan. Bahkan

anak-anak yang tidak melanjutkan wajib belajar itu sanksi hukumnya dapat dikenakan kepada orang tuanya.

2. Wajib belajar tersebut harus merupakan pendidikan minimal bagi masyarakat untuk dapat hidup sebagai warga negara.
3. Wajib belajar harus dibedakan dengan wajib bersekolah. Dengan wajib belajar tidak mutlak harus bersekolah tetapi wajib belajar itu dapat dilaksanakan diluar sekolah. Disini yang penting adalah belajarnya bukan bersekolahnya.
4. Terdapat dua pola level pendidikan wajib belajar yaitu wajib belajar pada tingkat SD dan wajib belajar pada tingkat sekolah menengah.pada negara berkembang umumnya wajib belajar itu benar-benar pada tingkat SD sementara di negara maju wajib belajar itu benar-benar pada tingkat sekolah menengah.
5. Secara konseptual wajib belajar di Indonesia sudah melebihi tingkat SD, tetapi belum sepenuhnya benar pada tingkat sekolah menengah dari sudut jenjang persekolahan wajib belajar di Indonesia pada tingkat SMP.
6. Meskipun wajib belajar (9 tahun) di Indonesia pada tingkat SMP namun secara substansial dipandang benar pada tingkat pendidikan dasar. Pengertian pendidikan dasar disini tentunya pembentukan dasar untuk menjadi warga negara Indonesia.
7. Pelaksanaan wajib belajar itu tidaklah selalu mudah karena ditentukan atau dipengaruhi oleh banyak faktor-faktor yang dapat menentukan dan mempengaruhi untuk itu perlu diidentifikasi agar wajib belajar itu dapat terlaksana seperti yang diharapkan.

B. Dasar Undang-Undang Wajib Belajar

Undang-undang sistem pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 pasal 34 ayat 32 menyebutkan tentang pendidikan dasar gratis 9 tahun bagi anak- anak di negeri ini dan pemerintah wajib menyediakan segala sarana dan prasarananya. Kewajiban belajar ini didasari oleh rendahnya sumber daya manusia Indonesia dan tantangan bangsa yang semakin kompetitif. Kondisi SDM bangsa ini memang memprihatinkan, di tingkat Asia Tenggara saja, kita masih berada dibawah Vietnam, Malaysia, Thailand, apalagi Singapura. Guna mempercepat peningkatan mutu Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia, Pemerintah merencanakan segera memulai gerakan wajib belajar 12 tahun secara bertahap. Langkah ini mau tidak mau harus dilakukan secepatnya untuk mengejar mutu SDM Indonesia yang

terpuruk hingga mendapat predikat terendah di Asia. Pada prinsipnya, dengan adanya otonomi daerah pemerintah tak lagi memungkinkan pelaksanaan wajib belajar 12 tahun dilakukan secara serentak dan seragam. Kalau dilakukan seragam, sama saja dengan saat masih sistem sentralistik. Yang dibutuhkan adalah adanya sebuah standar nasional. Intinya semua lulusan SLTA harus memiliki standar kompetensi tertentu (yang akan ditentukan kemudian). Cara mencapainya diserahkan kepada masing-masing sekolah. Pendidikan 12 tahun belum dilaksanakan disemua provinsi di Indonesia.

Wajib belajar memerlukan beberapa substansi utama adalah:

1. Tenaga pendidik seperti guru, tutor dan sebagainya yang akan melayani pelaksanaan wajib belajar itu.
2. Lamanya masa belajar dalam sistem wajib belajar yang akan terlaksanakan.
3. Peserta wajib belajar mengenal kondisi-kondisi tertentu.
4. Program wajib belajar melalui sekolah dan non sekolah.
5. Tahap-tahap pelaksanaan wajib belajar.
6. Sistem evaluasi belajar untuk wajib belajar.

C. Tujuan Diadakannya Program Wajib Belajar

Sebenarnya tujuan diadakannya program wajib belajar nasional diharapkan agar jumlah anak putus sekolah bisa diminimalisir dan juga sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia serta penuntasan wajib belajar yang tidak hanya merupakan upaya agar anak masuk sekolah, akan tetapi sekolah dengan sistem pembelajaran yang berkualitas.Setiap manusia yang hidup pasti membutuhkan pendidikan baik pendidikan formal ataupun informal. Pendidikan formal adalah proses belajar dan mencetak keahlian melalui lembaga formal dan dilakukan secara profesional. Sedangkan pendidikan informal, proses belajar tidak melulu harus melalui lembaga, melainkan dilakukan secara mandiri pun juga bisa. Pendidikan tidak hanya sekedar memberikan pengetahuan atau data saja. Pendidikan juga berfungsi untuk membangun karakter, moralitas, kemampuan, dan keahlian tertentu pada seseorang. Tanpa pendidikan, manusia tidak akan belajar, mengevaluasi proses hidupnya, dan memiliki kemampuan untuk bisa memenuhi hidup dan membangun sosialnya.

D. Hambatan Program Wajib Belajar

Penuntasan wajar 9 tahun 2009 terancam tak tercapai karena banyak kendala yang kurang diantisipsi oleh pemerintah, misalnya kondisi geografis wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan yang sangat sulit terjangkau oleh layanan pendidikan. Disamping itu, keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan, seperti gedung sekolah dan ruang kelas baru tidak dapat menampung seluruh siswa usia 7 sampai 15 tahun sehingga masih banyak peserta didik yang belum meraskan manfaat program ini.

Bantuan Operasional Sekolah (BOS), meskipun lebih maju, masih belum bisa menjamin terlaksananya pendidikan dasar secara gratis seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Sisdiknas diatas, terlebih lagi para siswa yang berasal dari keluarga miskin. Tidak antisipatif dan tidak tegasnya pihak pemerintah dalam menerapkan program wajar pendidikan dasar secara gratis inilah yang justru mengancam tidak tercapainya target yang telah dicanamkan sebelumnya ajukan bangsa ini melalui pendidikan.

Penyebab terkendalanya wajar 9 Tahun ini, faktor yang paling banyak terjadi adalah akibat kendala ekonomis. Pendapatan rendah didalam keluarga di pedalaman juga membentuk budaya yang tidak baik, sehingga sebagian mereka masih menganggap sekolah itu tidak penting. Secara umum faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar anak dibedakan menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Kedua faktor tersebutlah yang mempengaruhi hasil belajar anak. Berikut akan diuraikan tentang kedua faktor penghambat belajar.

1. Faktor Internal

   Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri individu dan dapat mempengaruhi hasil belajar individu. Faktor internal meliputi faktor fisiologis dan biologis serta faktor psikologis.

2. Faktor fisiologis dan biologis

   Masa peka merupakan masa mulai berfungsinya faktor fisiologis pada tubuh manusia. Faktor fisiologis adalah faktor yang berhubungan dengan kondisi fisik individu.

3. Keadaan fungsi jasmani atau fisiologis

   Selama proses belajar berlangsung, peran fungsi fisiologis pada anak sangat mempengaruhi hasil belajar, terutama panca indera. Panca indera yang berfungsi dengan baik akan mempermudah aktivitas belajar. Perasaan yang menghantui anak dapat

membuat prestasinya menurun. Namun ada juga anak yang menjadikan kekurangannya sebagai motivasi untuk maju. Cacat fisik membuat anak tidak dapat malakukan aktivitas belajar di sekolah dengan baik, sehingga perlu disediakan sekolah yang bisa menampungnya sesuai dengan cacat yang disandang. Misalnya bagi penyandang tuna netra bersekolah di SLBA, tuna rungu bersekolah di SLBB, dan sebagainya

E. Cara Mengatasi Hambatan Belajar

1. Diri anak
   a. Menjaga kesehatan jasmani
   b. Menumbuhkan rasa percaya diri.
   c. Membangun motivasi diri.
   d. Belajar berinteraksi dengan lingkungan.
   e. Belajar menjaga emosi.

2. Keluarga
   a. Memberi teladan dalam sikap dan tingkah laku kepada anak.
   b. Menjaga keharmonisan keluarga.
   c. Menyediakan waktu untuk mendampingi anak dalam belajar.
   d. Megusahakan kesehatan anak, misalnya dengan makanan bergizi.

3. Sekolah
   a. Guru mangendalikan diri (emosi) saat mengajar.
   b. Guru menjaga kedekatan dengan siswa maupun orangtua siswa.
   c. Guru bersikap adil pada semua siswa.
   d. Guru memberikan motivasi siswa, misalnya dengan pujian, dan sebagainya.
   e. Guru mamberikan teladan yang baik pada siswa.
   f. Guru mengajar dengan menggunakan metode yang menyenangkan.
   g. Guru melihat kelemahan masing-masing siswa, misalnya ada siswa yang cacat fisik letak posisi duduk didepan.
   h. Guru mamberi tugas sesuai dengan kemampuan siswa.
   i. Lingkungan yang nyaman untuk belajar siswa.

j. Memberikan kelonggaran tata tertib, namun tetap disiplin.

F. Implementasi Program Wajib Belajar di Indonesia

Pada dasarnya, implementasi wajib belajar di Indonesia, dilihat dari segi historis, umumnya masih belum terealisasi dengan sempurna, hal ini disebabkan karena beberapa faktor, yaitu :

1. Dana pendidikan yang relatif masih kecil.
2. Sarana dan prasarana pendidikan yang belum memadai.
3. Rendahnya mutu guru.
4. Belum memadainya jumlah SMP dibandingkan dengan jumlah SD.
5. Sekolah-sekolah dasar dibawah dua kekuasaan pengelolaan, yaitu Depdikbud dan Depdagri.

Sebenarnya lulusan agar PP nomor 65 tahun 1951 yang menjadi dasar hukum munculnya dualisme pengelolaan SD dicabut. Akan tetapi ternyata sampai sekarang hal itu belum terjadi, bahkan ketika keluar PP No. 28 Tahun 1990 mengenai pendidikan dasar, Depdagri cepat-cepat mengeluarkan peraturan yang menegaskan kembali keberlakuan PP No. 65 tahun 1951, sebelumnya Menteri Dalam Negeri juga keluar instruksi Mendagri No. 25 Tahun 1989 tentang penyerahan urusan Pendidikan Dasar dan Kebudayaan dari Pemda Tingkat I kepada Pemda Tingkat II dan pembentukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Tingkat II di kecamatan, seperti dinyatakan

H.A.R Tilaar bahwa “peraturan-peraturan yang simpang siur tersebut tentunya sangat menyulitkan didalam pengelolaan sekolah dasar, termasuk pendidikan dasar dalam rangka melaksanakan wajib belajar 9 tahun”. Pelaksanaan pendidikan dasar dalam rangka melaksanakan wajib belajar, akan menuntut keterpaduan antara sekolah dasar dan sekolah lanjutan tingkat pertama. Akan tetapi, berdasarkan peraturan diatas, pengelolaan SLTP tetap berada pada pemerintah pusat, sedangkan pengelolaan SD, berada pada pemerintah daerah. Padahal pengelolaan seperti ini akan membuat kurangnya efektifitas dan efisiensi dalam rangka pendidikan dasar dan pada gilirannya juga akan menyebabkan kurangnya mutu hasil pendidikan.

BAB IV :
PENDIDIKAN PRASEKOLAH

A. Konsep Pendidikan Prasekolah

Konsep pendidikan prasekolah dibagi menjadi dua yaitu prenatalis dan pronatalis. Bagaimana isi pendidikan prenatalis tersebut yaitu ada tiga hal, sebagai berikut :

1. Berkaitan dengan kesehatan, seperti rajin memeriksakan kandungan ke puskesmas atau dokter ahli anak, menjaga kondisi agar tidak sakit, apalagi sampai sakit yang diikuti oleh teperatur tinggi (demam) sebab akan mempengaruhi otak anak dalam kandungan.
2. Berkaitan dengan keamanan, seperti menjaga kandungan agar tidak terbentur, tidak jatuh, terpeleset, ditabrak, dalam artian berhati-hati jangan sampai kecelakaan, apalagi sampai jatuh tertelungkup sehingga merusak otak bayi dalam kandungan.
3. Berkaitan dengan nutrisi, mengkonsumsi makanan bergizi yang cukup untuk anak, konsultasi dengan petugas posyandu, yang berkaitan dengan protein sehingga pertumbuhan otak dalam kandungan dapat maksimal.

Tidak jarang kita temui dan kita dengar seorang anak yang lahir tidak dalam keadaan normal seperti tidak ada batok kepalanya, ususnya keluar, anusnya tidak ada, anggota badannya tidak lengkap, dan sebagainya dan umumnya hal seperti ini banyak menimpa kalangan menengah kebawah, bisa saja penyebabnya adalah salah satu faktor diatas. Hal yang tidak kalah pentingnya yang harus dijaga dan diperhatikan adalah kondisi kejiwaan ibu hamil, seorang suami harus bisa mengerti bagaimana perasaan istri, jangan sampai sering cekcok, apalagi sampai selingkuh pada saat istri hamil. Harus senantiasa menjaga, menciptakan situasi dan kondisi agar istri bahagia, sebab hal ini sangat berpengaruh terhadap kondisi psikologis anak tesebut. Malah ada yang mengatakan bahwa kondisi kejiwaan ibu pada saat hamil akan menjadi kondisi kejiwaan anak kelak jika dia telah lahir, misalnya ibu yang pemarah pada saat hamil maka anak yang dikandungnya akan mempunyai sifat dan pembawaan yang pemarah pula.

Sedangkan pendidikan setelah lahir (post natalis) terdiri:

1. Sekolah Titipan/Tempat Penitipan Anak (Day Care)

   Day Care adalah sarana pengasuhan anak dalam kelompok, biasanya dilaksanakan pada saat jam kerja. Day care merupakan upaya yang terorganisasi untuk mengasuh anak-anak diluar rumah mereka selama beberapa jam dalam satu haru bilamana asuhan orang tua kurang dapat dilaksanakan secara lengkap. Dalam hal ini penegertian Day Care hanya sebagai pelengkap terhadap asuhan orang tua dan bukan sebagai pengganti asuhan orang tua (Perserikatan Bangsa-Bangsa, 1990). Sarana penitipan anak ini biasanya dirancang secara khusus baik program, staf maupun pengadaan alat-alatnya. Tujuan sarana ini untuk membantu dalam hal pengasuhan anak-anak yang ibunya bekerja. Semula sarana penitipan anak diperuntukkan bagi ibu dari kalangan keluarga yang kurang beruntung, sedangkan sekarang sarana ini lebih banyak diminati oleh keluarga tingkat menengah dan atas yang umumnya disebabkan kedua orang tuanya bekerja. Di Negara maju, TPA dikenal dengan nama Sekolah Titipan (Nursey School) yang juga diperuntukkan anak-anak yang kedua orang tuanya ditarik ke lapangan kerja. Sekolah Titipan ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas dan petugasnya terdiri dari guru, perawat, dokter anak, psikolog, dan sebagainya. Selain itu Sekolah Titipan Anak ini juga banyak terdapat di mall dan swalayan dengan tujuan pada saat ibunya berbelanja maka anaknya dititip di sekolah tersebut. Biasanya anak yang dititip adalah anak usia antara 0 – 1 tahun.

2. Kelompok Bermain (Play Group)

   Bermain merupakan salah satu fenomena yang sangat menarik perhatian para pendidik, psikolog, ahli filsafat dan banyak orang lagi sejak beberapa dekade yang lalu. Mereka tertantang untuk lebih memahami arti bermain dikaitkan dengan tingkah laku manusia. Bermain benar-benar merupakan pengertian yang sulit dipahami karena muncul dalam beraneka ragam bentuk. Bermain itu sendiri bukan hanya tampak pada tingkah laku anak tetapi pada usia dewasa bahkan bukan hanya pada manusia (Spodek, 1991). Pada saat ini play group (kelompok bermain) semakin menjamur, para orang tua juga berlomba-lomba memasukkan anaknya ke kelompok bermain, tentu saja dengan berbagai alasan, seperti sekedar hanya untuk melepaskan diri sejenak dari rutinitas dan tanggung jawab dalam

hal mengasuh anak, keinginan untuk memberikan kesempatan kepada anak untuk berinteraksi dan bersosialisasi dengan teman seusianya dan tokoh pengasuh lain, agar anak mendapat stimulasi kognitif secara baik, atau agar anak mendapat pengasuhan pengganti sementara ibu bekerja, bahkan tidak bisa dipungkiri bahwa ada yang hanya sekedar mengikuti trend dunia masa kini, tanpa memahami apa manfaat yang diperoleh. Namun terlepas dari berbagai alasan diatas, dengan memasukkan anak ke kelompok bermain, anak akan memperoleh jauh lebih banyak manfaat utamanya dalam bersosialisasi daripada anak yang terkurung didalam rumah. Kelompok bermain itu sendiri biasanya dilaksanakan sebelum anak memasuki Taman Kanak- Kanak dengan kisaran usia antara 1-4 tahun. Pada kehidupan sehari-hari kegiatan bermain begitu mudah diamati namun dalam beberapa situasi, bermain sulit dibedakan dengan kegiatan yang bukan bermain. Schwartzman (1978) mengemukakan suatu batasan bermain sebagai berikut : "Bermain bukan bekerja; bermain adalah pura-pura; bermain bukan sesuatu yang sungguh-sungguh; bermain bukan sesuatu yang produktif; dan sebagainya, bekerja pun dapat diartikan bermain; sementara kadang-kadang bermain dapat dialami sebagai bekerja; demikian pula anak yang sedang bermain dapat membentuk dunianya sehingga seringkali dianggap nyata, sungguh-sungguh, produktif, dan menyerupai kehidupan yang sebenarnya." (SoemiartiP. 102;1995)

3. Taman Kanak-Kanak (Kindergarten)

Taman Kanak-Kanak (TK) didirikan sebagai salah satu usaha mengembangkan seluruh segi kepribadian anak didik dalam rangka menjembatani pendidikan dalam keluarga ke pendidikan sekolah. TK merupakan salah satu bentuk pendidikan prasekolah yang ada di jalur pendidikan sekolah. Taman Kanak-Kanak memberi kemungkinan kepada anak didiknya untuk mengembangkan seluruh aspek perkembangannya; memupuk sifat dan kebiasaan yang baik, menurut falsafah bangsa Indonesia; memupuk kemampuan dasar yang diperlukan untuk belajar pada kelas selanjutnya. Adapun tujuan TK adalah membentuk manusia Pancasila sejati, yang bertakwa kepada Tuhan YME, yang cakap, sehat dan terampil, serta bertanggung jawab kepada Tuhan, masyarakat dan negara. Sedangkan tujuan khususnya:

1. Memberi kesempatan kepada anak untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan fisik maupun psikologinya dan mengembangkan potensi-potensi yang ada padanya secara optimal sebagai individu yang unik.
2. Memberi bimbingan yang seksama agar anak memiliki sifat dan kebiasaan yang baik, sehingga mereka dapat diterima oleh masyarakatnya.
3. Mencapai kematangan mental dan fisik yang dibutuhkan agar dapat melanjutkan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

B. Landasan UU tentang Pendidikan prasekolah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 12 Ayat (2) menyebutkan "selain jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) , dapat diselenggarakan pendidikan prasekolah", adalah pendidikan yang diselenggarakan untuk mengembangkan pribadi, pengetahuan dan keterampilan, yang melandasi pendidikan dasar serta mengembangkan diri secara utuh sesuai dengan asas pendidikan sedini mungkin dan seumur hidup. Di dalam PP RI No. 27 Tahun 1990 tentang pendidikan prasekolah, bab 1 pasal 1 ayat (2) menyebutkan "selain jenjang pendidikan sebagaimana yang dimaksud dengan Taman Kanak-Kanak (TK) adalah salah satu bentuk pendidikan prasekolah yang menyediakan program pendidikan dini bagi anak usia empat tahun sampai memasuki Pendidikan Dasar. Lebih lanjut dijelaskan bahwa satuan pendidikan prasekolah meliputi Taman Kanak- Kanak terdapat dijalur pendidikan sekolah sedangkan Kelompok Bermain dan Penitipan Anak terdapat di jalur pendidikan luar sekolah. Pembinaan segi pendidikan anak pada Taman Kanak-Kanak, Kelompok Bermain dan Penitipan Anak menjadi tanggung jawab Mendikbud, sedangkan usaha pembinaan kesejahteraan anak bagi Kelompok Bermain dan Penitipan Anak menjadi tanggung jawab menteri sosial. Selanjutnya didalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0486/U/1992 Bab 1 Pasal 2 Ayat (1) telah dinyatakan bahwa "Pendidikan Taman Kanak-Kanak merupakan wadah untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak didik sesuai dengan sifat-sifat alami anak." Tindak lanjut dalam Bab II Pasal 4 dijelaskan bahwa anak didik di TK adalah anak berusia 4-6 tahun.

C. Kurikulum Pendidikan Prasekolah

Konsep yang digunakan ialah "Belajar Sambil Bermain" dengan menekankan "Pembelajaran Bertema". Kaedah pembelajaran ialah meliputi aktivitas kelas, aktivitas kumpulan dan aktivitas individu. Kurikulum Pendidikan prasekolah dirancang dengan teliti bagi memenuhi keperluan dan tahap perkembangan kanak-kanak berdasarkan Falsafah Pendidikan Nasional maupun potensi keberagaman karakteristik daerah masing-masing.

BAB V :
SEKOLAH DASAR SEKOLAH RENDAH

A. Perkembangan Penyelenggaraan Sekolah Dasar di Indonesia

Pada masa penjajahan Belanda, tingkat sekolah dasar disebut sebagai Europeesche Lagere School (ELS). Kemudian pada masa penjajahan Jepang disebut dengan Sekolah Rakyat (SR). Setelah Indonesia merdeka, SR berubah menjadi Sekolah Dasar (SD) pada tanggal 13 Maret 1946. Sekolah dasar (disingkat SD;Inggris:Elementary School) adalah jenjang paling dasar pada pendidikan formal di Indonesia. Sekolah dasar ditempuh dalam waktu 6 tahun, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Saat ini murid kelas 6 diwajibkan mengikuti Ujian Nasional (dahulu Ebtanas) yang mempengaruhi kelulusan siswa. Lulusan sekolah dasar dapat melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah pertama (atau sederajat). Pelajar sekolah dasar umumnya berusia 7-12 tahun.

Di Indonesia, setiap warga negara berusia 7-15 tahun tahun wajib mengikuti pendidikan dasar, yakni sekolah dasar (atau sederajat) 6 tahun dan sekolah menengah pertama (atau sederajat) 3 tahun. Sekolah dasar diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta. Sejak diberlakukannya otonomi daerah pada tahun 2001, pengelolaan sekolah dasar negeri (SDN) di Indonesia yang sebelumnya berada dibawah Departemen Pendidikan Nasional, kini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten/kota. Sedangkan Departemen Pendidikan Nasional hanya berperan sebagai regulator dalam bidang standar nasional pendidikan. Secara struktural, sekolah dasar negeri merupakan unit pelaksana teknis dinas pendidikan kabupaten/kota.

Dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Nomor 20 Tahun 2001) Pasal 17 mendefinisikan pendidikan dasar sebagai berikut: (1) Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. (2) Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.

B. Asumsi Pelaksanaan Sekolah Dasar di Indonesia

Ada beberapa asumsi pelaksanaan sekolah dasar, sekolah rendah di Indonesia :

1. Untuk dapat hidup layak sebagai warga negara perlu memiliki pendidikan minimal. Pendidikan minimal di Indonesia adalah Sekolah Dasar yang merupakan program wajib belajar sembilan tahun yang harus dijalani oleh setiap warga Negara.
2. Pendidikan minima yang harus dimiliki oleh setiap warga negara selain sepenuhnya pengetahuan, juga pembentukan watak moral dan kepribadian.
3. Memiliki pengetahuan fundamental memberi peluang yang luas bagi seseorang untuk melaksanakan berbagai hal. Dengan adanya pendidikan dasar yang diperoleh dari Sekolah Dasar maka akan memperkuat pendidikan selanjutnya baik dari pengetahuan, watak, moral dan kepribadian.
4. Saat ini kita memasuki dunia global, mereka yang tidak mempunyai pendidikan dasar akan ketinggalan dan mengalami keterbelakangan, bahkan akan terjerumus kehal-hal yang tidak diinginkan misalnya perbuatan yang sifatnya anarkis, karena tidak ada hal yang bisa dijadikan pegangan hidup.

C. Konsep Sekolah Dasar

Konsepsi pendidikan dasar dapat dijabarkan dalam poin- poin sebagai berikut:

1. Pada mulanya Sekolah Dasar diartikan sebagai Sekolah Rendah. Sekolah Rendah itu adalah suatu tingkat pendidikan yang berfungsi memberikan pengetahuan elementary, karena disebut elementary school.
2. Pengetahuan elementary yang dinyatakan itu ialah 3R (Reading, Writing, Aricmatich) pengetahuan itu merupakan pengetahuan elementary untuk dapat hidup bernegara dan berbangsa.
3. Peralihan konsep tradisional ke konsep progresif membuat Sekolah Rendah berubah menjadi Sekolah Dasar. Sekolah Dasar bukan Sekolah Rendah, tetapi Sekolah Dasar tempat pembentukan dasar untuk menjadi warga negara yang layak. Oleh karena Sekolah Dasar pelaksanaannya menjadi bukan ditujukan hanya pada aspek pemberian pengetahuan, melainkan pada pembentukan dasar, maka kurikulumnya harus komprehensif artinya tuk terbaik lagi pada 3R saja.

4. Isi pendidikan Sekolah Dasar harus mendapatkan pendidikan persekolahan, pemberian moral dan pemberian kepribadian.

D. Pengelolaan Sekolah Dasar di Indonesia

Adapun implementasi pengelolaan pendidikan sekolah dasar di Indonesia, meliputi :

1. Kurikulum atau isi pendidikan pada SD pelaksanaannya bukan bersifat akademik. Akan tetapi akan lebih akrab dengan kepentingan persiapan sebagai warga Negara.
2. SD lima tahun dengan menggunakan sistem pembelajaran dan teknologi pendidikan yang lebih baik bukan saja yang lebih ekonomis, namun kualitas lulusannya akan di bawah kualitas lulusan SD 6 tahun.
3. Kualifikasi guru yang standar untuk SD minimal sarjana, sehingga tujuan pembentukan dasar di SD dapat terwujud sepenuhnya seperti yang diharapkan.
4. Kode etik jabatan guru harus dirimuskan lebih jelas lagi, mengingat guru adalah seorang sarjana yang memiliki academic freedom.
5. Perlu adanya suatu sistem penggajian tunjangan guru SD serta mekanisme mutasi dan premis yang dapat menarik minat untuk menjadi guru SD.
6. Untuk daerah terpencil atau pulau kecil yang berdekatan terdapat kantong pendidikan dasar di mana anak-anak dapat memperoleh pendidikan.
7. Upaya pengembangan sarana dan alat-alat pengajaran perlu terus mendapatkan perhatian.

E. Implikasi Masalah Pendidikan Sekolah Dasar

1. Pengelolaan pendidikan atau educational administration yang lebih sesuai.
2. Pendidikan guru yang bertaut pendidikan tinggi (collage).
3. Pelatihan multi pelajaran yang tepat dan sesuai.
4. Kemampuan memanfaatkan teknologi pendidikan yang diharapkan.
5. Dana pendidikan yang harus tersedia.

F. Solusi Masalah Pendidikan Sekolah Dasar

Beberapa alternative solusi yang dapat diterapkan diantaranya:

1. Pengelolaan yang bersifat sentralisasi sudah harus beralih ke pengelolaan deferensiasi.
2. Pengelolaan pendidikan SD harus dikelola satu atap dengan departemen pendidikan.

3. Setiap sarjana yang memiliki pendidikan guru dapat menjadi guru SD yang digaji minimal di ijazah yang dimiliki dan pengalaman mengajar.
4. Penyetaraan pendidikan guru SD yang mencapai S1 secara bertahap.
5. Muatan lokal dalam kurikulum SD harus mendukung sosialisasi anak di dalam menjalani hidup.
6. In service training bagi penggunaan berbagai teknologi pembelajaran.

BAB VI :
SEKOLAH MENENGAH KOMPREHENSIF

A. Tendensi dan Asumsi Penyelenggaraan Sekolah Menengah Komprehensif

Selanjutnya beliau mengatakan bahwa ada beberapa tendensi yang berkaitan dengan pelaksanaan sekolah menengah, yaitu :

1. Sekolah Menengah Pertama
   a. SMP harus mengalami perubahan revolusioner pada jenis, sifat, dan lama pendidikannya supaya disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan Pendidikan Nasional.
   b. SMP yang juga boleh disebut sekolah pemuda hendaknya memuat 4 tahun pelajaran.
   c. Pelajarannya terutama bersifat pembentukan umum menurut prinsip-prinsip Pendidikan Nasional. Jadi dalam SMP belum ada spesialisasi. Spesialisasi baru dimulai sesudah SMP, namun agar SMP mempunyai keterampilan praktis, dan menghasilkan anak didik yang dapat berdiri sendiri , disamping mata-mata pelajaran umum, hendaknya SMP mempunyai diferensiasi. Diferensiasi terdiri atas pelajaran-pelajaran elementer keahlian, yang diberikan selama 4 tahun juga murid-murid boleh memilih sendiri menurut bakatnya, akan tetapi hanya boleh memilih salah satu jurusan keahlian saja dan mereka dibimbing oleh pembimbing dan penyuluh yang diusahakan sekolah.
   d. Sesuai dengan perkembangan itu, maka pendidikan di SMP sudah dapat mempunyai bagian-bagian misalnya: kelompok dasar, kelompok kesenian, kelompok perdagangan, kelompok administrasi, kelompok keterampilan/ketangkasan, dll.
   e. Pada akhir SMP si murid tidak hanya mempunyai ijazah, melainkan juga sudah memiliki kecakapan jurusan sederhana, misalnya teknik, pertanian dsb. Kecakapan ini disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Jadi jika murid tidak meneruskan sekolah, dia sudah dapat bekerja.

2. Sekolah Menengah Atas
    a. Sekolah menengah sebagai General Education berbeda dan terpisah dari sekolah menengah sebagai Vocational Education.
    b. Sekolah menengah (General Education) mulai dari tingkat SMP sampai tingkat SMA / SMK yang masa belajarnya 3 tahun tambah 3 tahun seperti biasanya atau 4 tahun ditambah 2 tahun (perlu diteliti dari sudut psikologi remaja).
    c. Kurikulum sekolah menengah tersebut selain memberikan hal-hal yang praktis sebagai bekal kemasyarakat juga terdapat program terminal baik merupakan suatu paket
    d. keterampilan yang dapat dipilih siswa yang tak berminat ke perguruan tinggi.
    e. Kurikulum yang bersifat akademik selain basis bagi pendidikan tinggi juga merupakan program yang memperluas sistem intelektual siswa.

B. Konsep Sekolah Menengah Komprehenshif

Sekolah menengah komprehensif sebagai sekolah menengah yang menawarkah kurikulum sekolah umum, sekolah teknik dan sekolah umum, sekolah teknik dan sekolah modern atau disebut juga sekolah yang memberikan kombinasi diantara kurikulum tersebut. Di sekolah ini murid ditempatkan pada aliran yang berbeda sesuai dengan bakat dan kemampuan mereka. Sekolah komperensif mirip dengan sekolah di Amerika yang menggunakan sistem pengelompokan atau disebut dengan sistem pelacakan (tracking). Tujuan dari sekolah komprensif adalah demoktratisasi pendidikan dan melayani minat dan kebutuhan siswa, selain itu sekolah ini juga bertujuan untuk memberikan kesempatan pendidikan bagi semua anak, bukan untu membagi mereka menjadi kelompok yang berbeda.

C. Pelaksanaan Sekolah Menengah Komprehensif di Indonesia

Sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan adalah termasuk jenis sekolah menengah yang seolah-olah tidak pernah berhenti dipermasalahkan. Jika pada masa awal kemerdekaan SMK merupakan sekolah favorit, kini praktis SMK menjadi sekolah “kelas dua”. Lulusan SMP yang masuk ke SMK pada umumnya bukan mereka yang tergolong tinggi kemampuan dasarnya. Jadi masuk ke SMK bukan karena pilihan, tetapi karena tidak berani atau tidak diterima di SMA. Jadi asumsi bahwa lulusan SMP yang ingin segera

bekerja akan masuk ke SMK dan yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi masuk ke SMA, tidak terwujud. Data menunjukkan sekitar 60 % lulusan SMA tidak melanjutkan dan yang mengejutkan mereka sengaja memilih SMA walaupun setelah lulus akan mencari pekerjaan. Artinya lulusan SMP belum menganggap bahwa untuk persiapan memasuki dunia kerja, SMK lebih cocok dibanding SMA.

D. Pendidikan Komprehensip dengan Inovasi Pembelajaran

Pendidikan Komprehensif adalah pembelajaran yang berkelanjutan mulai dari PAUD/SD-SMP-SMA/SMK-PT. Pembelajaran yang meliputi banyak hal yaitu Ilmu Pengetahuan, Budi Pekerti, Akhlak, Karakter, Kreativitas, Inovatif. Istilah komprehensif yang digunakan dalam pendidikan karakter mencakup berbagai aspek. Aspek yang pertama isinya harus komprehensif, meliputi suatu permasalahan yang berkaitan dengan pilihan nilai-nilai yang bersifat pribadi sampai kepada pertanyaan-pertanyaan mengenai etika secara umum. Kedua metodenya harus komprehensif yang meliputi penanaman nilai, pemberian teladan kepada peserta didik. Ketiga Pendidikan karakter hendaknya terjadi dalam keseluruhan proses pendidikan di kelas, dalam kegiatan ekstrakulikuler, dalam proses bimbingan dan penyuluhan. Yang terakhir, keempat, pendidikan karakter hendaknya terjadi melalui kehidupan dalam masyarakat, karena peran serta masyarakat atau lingkungan dapat mempengaruhi karakter peserta didik (generasi muda). Didalam pembelajaran di sekolah harus membuat standarisasi bahwa kelompok bermain adalah saat anak memang bermain, PAUD saat anak bermain, Sekolah Dasar saat anak mulai dibangunkan karakternya supaya fundamen dalam diri anak tersebut benar-benar kuat, karakter SMP dan SMA/SMK lebih condong kepada pertengahan antara Pendidikan.

E. Implikasi Masalah Pendidikan Sekolah Menengah Komprehensif

1. Masalah penempatan guru, khususnya penempatan guru bidang studi sering mengalami kepincangan tidak disesuaikan dengan kebutuhan lapangan. Solusinya adalah kurikulum harus melakukan tindakan ansipasi terhadap pemberian bekal bagi calon luaran sesuai dengan ketentuan zaman.
2. Terbatasnya sarana dan prasarana belajar di sekolah seperti buku pelajaran, atau alat laboratorium/alat praktek. Solusinya yaitu perlu terus diupayakan pemenuhan sarana dan

prasarana pembelajaran yang memadai sebagaimana diisyaratkan dalam standar pelayanan minimal (SDM) Kep Men Diknas No. 053/U/2001.

3. Kualitas pembelajaran masih rendah, karena guru masih mendominasi proses pembelajaran, sedang siswa masih pasif. Solusinya adalah diharapkan guru mau melaksanakan fungsinya sebagai agen perubahan bagi perkembangan siswanya sekaligus sebagai pembimbingnya.
4. Kegiatan pembelajaran yang masih berpusat pada guru, pengembangan materi pelajaran tidak kontekstual dan kinerja siswa rendah baik pada proses maupun produk belajarnya. Keadaan tersebut potensial menimbulkan kejenuhan, kebosanan serta menurunkan minat dan motivasi belajar siswa. Hal ini menyebabkan siswa tidak memiliki pengalaman belajar dan proses pembelajaran menjadi tidak bermakna. Jadi diharapkan guru mampu memainkan peran sebagai inovator pembelajaran.

F. Solusi Permasalahan Pendidikan Sekolah Menengah Komprehensif

Mengingat persepsi masyarakat terhadap SMK negatif, sementara itu serbuan iklan dari sekolah-sekolah asing semakin gencar, maka sudah saatnya dilakukan revitalisasi terhadap SMK. Persepsi tersebut harus dapat diubah, sehingga masyarakat meyakini, bahwa SMK merupakan pilihan yang tepat jika lulusan SLTP mengharapkan akan memasuki lapangan kerja setelah tamat SLTA. Untuk itu SMK harus mampu membuktikannya di lapangan dan bukan sekedar merupakan slogan.

Dalam revitalisasi, tampaknya aspek efektivitas dan efisiensi menjadi titik kritikal. Efektif artinya, program-program di SMK benar-benar sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja. Efisien artinya program-program tersebut dilaksanakan dengan waktu, sumberdaya dan dana yang seminimal mungkin. Efektivitas SMK akan diukur seberapa jauh program di SMK relevan dengan kebutuhan dunia kerja, sehingga lulusannya memiliki kompetensi yang diperlukan oleh lapangan kerja. Untuk ini mau tidak mau SMK harus melihat kecenderungan ketenagakerjaan pada tingkat menengah.

Sudah banyak ahli yang menjelaskan bahwa kedepan keterampilan manual akan digeser oleh keterampilan intelektual (Samani, 1998). Produk- produk barang kini mengarah kebentuk-bentuk miniatur, memiliki kemampuan tinggi, dirangkai dalam bentuk modul-modul dan dirancang sebagai produk yang single use. Kepraktisan, kenyamanan pemakaian

dan kemudahan pemeliharaan/reparasi tampaknya menjadi alasan utama. Jika peralatan seperti itu rusak, maka yang diperlukan adalah mencari bagian (modul) yang rusak dan kemudian melepas dan menggantinya dengan yang baru. Dengan demikian yang diperlukan adalah teknisi yang mampu bernalar untuk menganalisis rangakaian peralatan tersebut, sementara keterampilan manual yang diperlukan hanyalah merupakan dasar saja, yaitu sekedar melepas dan memasang kembali.

BAB VII :
PENDIDIKAN GURU

A. Asumsi Pendidikan Guru

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pelaksaan Nasional dinyatakan dengan jelas bahwa tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan layanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan (pasal 39 ayat 1). Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terutama bagi pendidik di perguruan tinggi (pasl 39 ayat 2).

Berdasarkan pada rumusan tersebut, secara implisit dinyatakan bahwa guru (pendidik) adalah tenaga profesional yang memiliki kemampuan dalam merencanakan, melaksanakan, menilai dan membimbing pembelajaran. Guru yang profesional diharapkan memiliki kemampuan minimal yang dipersyaratkan atau memiliki kompetensi tersebut dalam melaksanakan tugas-tugas profesionalnya.

Banyak rumusan yang menggambarkan kompetensi yang harus dimiliki guru dalam melaksanakan tugasnya. Cooper (Sudjana, 2004) mengemukakan empat kompetensi guru, yaitu (a) mempunyai pengetahuan tentang belajar dan tingkah laku manusia, (b) mempunyai pengetahuan dan penguasaan tentang bidang studi yang diajarkan, (c) mempunyai sikap yang tepat tentang diri sendiri, sekolah, teman sejawat, dan bidang studi yang diajarkannya, dan (d) mempunyai keterampilan teknik dalam mengajar. Sedangkan Glasser (Sudjana, 2004) juga mengemukakan empat yang menunjukkan kompetensi yang harus dikuasai oleh seorang guru yaitu: (a) menguasai bahan ajar, (b) kemampuan mendiagnosis tingkah laku siswa, (c) kemampuan melaksanakan proses pembelajaran, dan (d) kemampuan mengukur hasil belajar siswa.

Secara mental/kepribadian, guru harus: berkepribadian/berjiwa Pancasila, mampu menghayati GBHN, mencintai bangsa dan sesama manusia dan rasa kasih sayang terhadap

peserta didik, berbudi pekerti luhur, berjiwa kreatif, mampu mnyuburkan sikap demokrasi dan penuh tenggang rasa, mampu mengembangkan kreativitas dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas, mampu mengembangkan kecerdasan yang tinggi, bersikap terbuka, peka dan inovatif, berdisiplin, dan memiliki rasa humor.

Persyaratan keilmuan atau pengetahuan yang harus dimiliki oleh guru adalah memahami ilmu yang dapat melandasi pembentukan pribadi, memahami ilmu yang dapat melandasi pembentukan pribadi, memahami ilmu pendidikan dan keguruan serta mampu menerapkannya dalam tugas sebagai pendidik, memahami, menguasai dan mencintai ilmu pengetahuan atau bidang studi yang diajarkannya, memiliki kemampuan yang cukup tentang bidang-bidang lain, senang membaca buku-buku ilmiah, mampu memecahkan persoalan secara sistematis, terutama yang berhubungan dengan bidang studi, dan memahami prinsip-prinsip kegiatan pembelajaran.

Jenis keterampilan yang menjadi syarat kompetensi guru adalah: mampu berperan sebagi organisator, proses pembelajaran, mampu menyusun bahan pelajaran, atas dasar pendekatan struktural, interdisipliner, fungsional, perilaku, dan teknologi, mampu memecahkan dan melaksanakan teknik-teknik mengajar dengan baik dan mencapai tujuan pendidikan, mampu merencanakan dan melaksanakan evaluasi pendidikan, dan memahami serta mampu melaksanakan kegiatan dan pendidikan luar sekolah.

Menelaah kompetensi yang harus dimiliki oleh guru tersebut di atas, maka kompetensi-kompetensi tersebut dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu: kompetensi profesional yang berkaitan dengan kemampuan akademik, kompetensi personal yang berkaitan dengan aspek-aspek kepribadian, dan kompetensi sosial berkaitan dengan kemampuan guru dalam melakukan sosial adjustment dalam masyarakat yang dapat memperlancar tugas dan membangun citra profesi. Ketiga kompetensi tersebut harus terintegrasi dan terinternalisasi dalam perilaku dalam kinerja guru. Untuk mencapai kompentensi-kompetensi tersebut di atas tentu saja melalui suatu proses yang tidak mudah, yaitu melalui suatu jenjang pendidikan, pelatihan- pelatihan (training), dan pengalaman yang memakan waktu cukup panjang.

B. Konsep Sistem Pendidikan Guru

Guru adalah suatu jabatan profesional, yang memiliki jabatan dan kompetensi profesional. Pendidikan guru adalah pendidikan profesional, yang terdiri dari kategori : pendidikan pre-service, pendidikan in-service, pendidikan berlanjut, pendidikan lanjutan, dan pengembangan staf. Pendidikan guru dipadukan dalam suatu sistem proses pengadaan, pengembangan, dan pengelolaan. Setiap lembaga pendidikan guru harus berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945. Tujuannya adalah: Membentuk manusia yang ber-Pancasila dan membentuk manusia Indonesia yang sehat jasmani dan rohaninya, memiliki pengetahuan dan keterampilan, dapat mengembangkan kreativitas dan tanggung jawab, dapat menyuburkan sikap demokrasi dan penuh tenggang rasa, dapat mengembangkan kecerdasan yang tinggi dan disertai budi pekerti yang luhur, mencintai bangsanya dan mencintai sesama manusia sesuai dengan ketentuan yang termasuk dalam UUD 1945. Berdasarkan pada kebijakan nasional dalam bidang pendidikan, yakni pemerataan kesempatan belajar, peningkatan relevansi pendidikan sesuai dengan tuntutan pembangunan, peningkatan mutu pendidikan, serta efisiensi efektivitas pendidikan. Dalam hubungan inilah, guru secara profesional menempati titik sentral.

C. Komponen-Komponen Sistem Pendidikan Guru

1. Lulusan

   Para lulusan adalah produksi sistem pendidikan guru. Kuantitas dan kualitasnya sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, tujuan institusional, dan harapan masyarakat, yaitu guru yang baik, baik ditinjau dari proyeksi nasional (Pancasila dan UUD 1945), proyeksi pembangunan nasional sebagai manusia pembangunan,dan dari segi kriteria profesional.

2. Calon siswa/mahasiswa

   Calon siswa/mahasiswa adalah masukan dalam bentuk material mentah ke dalam proses pendidikan guru. Karena ledakan para calon besar, menyebabkan besarnya arus siswa pada berbagai jenjang pendidikan. Semua hal tersebut menjadi tanggung jawab sistem pendidikan guru untuk memprosesnya.

3. Proses pendidikan guru

   Proses ini berlangsung dalam kelas, dalam kegiatan ekstrakurikuler, dan pada kehidupan luar kelas. Lawrence Downey mengatakan bahwa proses pendidikan mengandung 3 dimensi.

a. Dimensi substantif mengenai bahan apa yang diajarkan.
b. Dimensi tingkah laku guru tentang bagaimana guru mengajar. Jadi, bertalian dengan kemampuan guru dan metode mengajar.
c. Dimensi lingkungan fisik, sarana, dan prasarana pendidikan.

4. Manusia

Komponen ini terdiri dari unsur guru dan unsur staf personel. Guru memegang peranan sangat penting dalam proses pendidikan guru. Karena itu harus memiliki kualifikasi profesional sehingga mampu mengemban tugas dan peranannya. Dinyatakan oleh William Taylor bahwa pada masa yang akan datang peranan guru semakin bertambah luas. Guru merupakan agen kognitif, guru sebagai agen moral dan politik, guru selaku inovator, guru berperan sebagai kooperatif, dan guru sebagai agen persamaan sosial dan pendidikan. Selain itu, para staf personel bertugas menunjang proses pendidikan dengan memberikan palayanan teknis dan administratif.

5. Metode

Komponen ini mengandung unsur subtantif atau program kurikuler, metode penyajian bahan, dan media pendidikan. Tiap jenjang pendidikan guru memiliki programnya sendiri, sesuai dengan tujuan institusionalnya, yang membutuhkan metode penyampaian dan media pendidikan yang tepat guna, demi tercapainya mutu pendidikan yang baik.

6. Materi

Komponen ini mengandung unsur fasilitas, sarana, dan prasarana pendidikan. Bila komponen ini telah tersedia secara memadai, maka akan memperlncar proses pendidikan dan akan memberikan mutu lulusan yang baik.

7. Evaluasi

Komponen ini berfungsi menilai sejauh mana keberhasilan proses pendidikan guru, memeriksa mutu lulusan, dan menyediakan informasi yang berguna untuk perbaikan sistem pendidikan guru pada masa mendatang.

8. Umpan balik

   Bila dari subsistem evaluasi terdapat berbagai kelemahan dalam sistem pendidikan guru, maka perlu ditinjau kembali dan direorganisasi agar lebih mantap. Karena itu, komponen umpan balik sangat diperlukan dan perlu dikembangkan pengelolaan sistem informasi.

9. Masyarakat

   Komponen ini merupakan input eksternal sosial budaya. Karena pendidikan adalah bagian integral dari kebudayaan, maka sistem pendidikan guru yang menjadi bagian dari kebudayaan itu berfungsi sebagai pengawet dan sekaligus pencipta dati keudayaan.

D. Syarat-Syarat Menjadi Guru

Guru adalah salah satu faktor penentu untuk tercapainya tujuan pendidikan nasional. Oleh karena itu persyaratan untuk menjadi guru di Indonesia selalu tercantum dalam undang-undang mengenai pendidikan. Di dalam Undang Undang Pokok Pendidikan No 4 tahun 1950 pasal 15 ditetapkan bahwa syarat-syarat utama untuk menjadi guru ada 4 yaitu:

1. Syarat professional (ijazah)
2. Syarat biologis (kesehatan jasmani)
3. Syarat psikologis (kesehatan mental)
4. Syarat pedagogisdidaktis (pendidikan dan pengajaran)

Pada UUSPN No 2 Tahun 1989 pasal 28 ayat 2 disebutkan: untuk dapat diangkat sebagai tenaga pengajar, tenaga kependidikan yang bersangkutan harus beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, berwawasan Pancasila dan UUD 1945 serta memiliki kualifikasi sebagai pengajar. Menurut Undang-undang No 14 tahun 2005, yang dimaksud dengan guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi sebagai agen pembelajaran, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Kualifikasi akademik seorang guru tertuang dalam Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Suryosubroto,2010). Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik dibuktikan dengan ijazah dan atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pendidik pada pendidikan anak usia dini memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D IV) atau sarjana (S1) dengan latar belakang pendidikan tinggi di bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru PAUD. Pendidik pada pendidikan SD/MI atau bentuk lain yang sederajat memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D IV) atau sarjana (S1) dengan latar belakang pendidikan tinggi di bidang pendidikan SD/MI, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru SD/MI .

Pendidik pada pendidikan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D IV) atau sarjana (S1) dengan latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan dan sertifikat profesi guru SMP/MTs. Pendidik pada SMA/MA atau bentuk lain yang sederajat memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D IV) atau sarjana (S1) dengan latar belakang pendidikan tinggi di bidang yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan, dan sertifikat profesi guru SMA/MA.

Pendidik pada SDLB/SMPLB/SMALB atau bentuk lain yang sederajat memiliki kualifikasi pendidikan minimum D IV atau S1 latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan khusus atau sarjana yang
sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan dan sertifikat profesi guru untuk SDLB/SMPLB/SMALB. Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar, menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi:

1. kompetensi pedagogic
2. kompetensi kepribadian,
3. kompetensi professional
4. kompetensi sosial.

E. Lembaga Pendidikan Keguruan

Pendidikan Guru (SPG) yang mendidik guru SD bagi yang belum memenuhi persyaratan diwajibkan mengikuti pendidikan yang sederajat yakni Kursus Pendidikan Guru (KPG). Tahun 1989 persyaratan untuk menjadi guru SD diringkatkan lagi menjadi minimal program Diploma II, sedangkan SPG dilikuidasi dan perangkat sumber dayanya dilimpahkan ke Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan atau LPTK (IKIP, FKIP dan STKIP). Setelah alih fungsi dari SPG dan SGO ke LPTK dapat dikatakan bahwa lembaga yang hampir lengkap menyelenggarakan pendidikan tenaga kependidikan dari SD sampai SLTA. Untuk menghasilkan tenaga kependidikan yang bermutu, IKIP dan FKIP ada pula yang telah mampu menyelenggarakan program pasca sarjana yang menyelenggarakan program S2 dan S3 ilmu kependidikan (Soetjipto dan Kosasi,1999).

Beberapa tahun yang lalu lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) juga menyelenggarakan program akta mengajar. Program akta mengajar membekali lulusan perguruan tinggi non kependidikan dengan ilmu-ilmu pedadogik. Hal ini ada bertolak dari kebutuhan guru pada bidang- bidang tertentu (terutama kejuruan seperti pertanian, kesehatan dll) yang pendidikannya diselenggarakan oleh lembaga lain. LPTK sebagai lembaga pendidikan bagi guru selalu menyesuaikan dengan kompetensi yang diperlukan dan disyaratkan bagi guru. Karena untuk saat ini, syarat pendidikan bagi guru adalah S1 atau D4, maka LPTK hanya menyelenggarakan pendidikan keguruan yang setara sarjana dan pasca sarjana.

Mata kuliah yang diberikan di LPTK ditujukan untuk memberikan pengalaman kepada calon tenaga kependidikan agar mereka mempunyai kompetensi seperti yang telah ditentukan. Mata kuliah dikelompokkan menjadi empat kelompok, yaitu:

1. Kelompok mata kuliah dasar umum (MKDU),
2. Kelompok mata kuliah dasar kependidikan (MKDK),
3. Kelompok mata kuliah bidang studi (MKBS)
4. Kelompok mata kuliah proses belajar mengajar (MKPBM).

MKDU memberikan kemampuan yang secara umum harus dimiliki oleh lulusan perguruan tinggi di Indonesia. MKDK bertujuan memberikan kesempatan kepada mahasiswa calon guru untuk mempelajari ilmu dan praktek keguruan dan ilmu-ilmu yang menunjang

profesi keguruan. MKBS mengarahkan pengalaman belajar pada isi, metodologi dan filosofi bidang ilmu tertentu yang akan diajarkan calon tenaga kependidikan pada siswanya kelak. MKPBM diarahkan untuk membentuk kemampuan keguruan, baik yang bersifat umum dalam bentuk prinsip dan pendekatan yang berlaku untuk keperluan pengajaran maupun yang bersifat khusus, yaitu teknik serta prosedur yang erat kaitannya dengan hakikat isi bahan ajaran tertentu (Soetjipto dan Kosasi, 1999).

Sebagai gambaran tentang kurikulum di LPTK, di bawah ini adalah dua kurikulum untuk mahasiswa Universitas Negeri Malang dari jurusan fisika dan ekonomi. Kurikulum program studi pendidikan fisika terdiri dari mata kuliah keahlian I sebanyak 95 sks (termasuk KKN dan skripsi), mata kuliah keahlian II sebanyak 26 sks, mata kuliah dasar keahlian 10 sks, mata kuliah umum sebanyak 14 sks dan mata kuliah pilihan minimum 4 sks. Mata kuliah umum terdiri dari mata kuliah pendidikan agama, pendidikan Pancasila, pendidikan kewiraan, bahasa Inggris, ilmu sosial dasar, dasar-dasar sains dan bahasa Indonesia profesi. Mata kuliah dasar keahlian terdiri dari pengantar pendidikan, perkembangan peserta didik dan belajar dan pembelajaran. Mata kuliah keahlian I merupakan mata kuliah sesuai dengan bidang studi yaitu fisika. Mata kuliah keahlian II terdiri dari: kemampuan dasar mengajar fisika, strategi belajar mengajar fisika, evaluasi proses dan hasil pembelajaran fisika, telaah kurikulum fisika sekolah menengah, pengembangan program pengajaran fisika, metode penelitian pendidikan fisika dan program pengalaman lapangan.

Mata kuliah yang bisa diambil sebagai mata kuliah pilihan terdiri dari media komputer dalam pembelajaran fisika, media pengajaran fisika, pengembangan model pembelajaran fisika, optika, fisika bumi dan antariksa dan sejarah fisika (UM, 2001). Kurikulum program studi pendidikan ekonomi terdiri dari 149 sks yang terbagi dalam mata kuliah pengembangan kepribadian sebanyak 10 sks, mata kuliah keilmuan dan ketrampilan sebanyak 87 sks, mata kuliah keilmuan dan keterampilan pilihan sebanyak 12 sks, mata kuliah keahlian berkarya sebanyak 22 sks, mata kuliah perilaku berkarya 14 sks dan mata kuliah berkehidupan bermasyarakat (KKN) sebanyak 4 sks. Kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian terdiri dari pendidikan agama, Bahasa Indonesia keilmuan, Bahasa Inggris profesi dan pendidikan Pancasila. Kelompok mata kuliah keilmuan dan ketrampilan adalah mata kuliah inti fakultas dan program studi.

Mata kuliah berkarya meliputi kemampuan dasar mengajar, pengembangan bahan ajar, perencanaan pembelajaran, penelitian pendidikan, strategi pembelajaran, evaluasi proses dan hasil belajar serta mata kuliah pengembangan media dan pembelajaran berbasis TIK. Mata kuliah perilaku berkarya terdiri dari PPL keguruan, KKL dan Pendadaran dan skripsi (catalog UM 2010). Setelah menyelesaikan studinya maka seorang mahasiswa berhak menyandang gelar sarjana pendidikan. Dengan menyelesaikan studinya di LPTK seorang sarjana pendidikan telah memenuhi kualifikasi akademik untuk mengajar. Banyak guru baru menyatakan bahwa pengalaman mereka selagi kuliah sungguh mengesankan, mengganggap saat itu merupakan fase berharga dalam program Pendidikan guru.

Meskipun ada yang menganggap bersifat teoritis sehingga kurang mempunyai nilai praktis. Dasar dari sikap yang terakhir ini adalah karena mata kuliah teori terlalu bersifat akademik dan mahasiswa belum menyadari sepenuhnya bahwa mata kuliah tersebut dapat membantunya kelak dalam mengajar (Mahmud, 1989). Pengajaran yang baik harus diamati dan dipraktekkan tetapi ada prinsip-prinsip pengajaran yang baik yang perlu diketahui guru, yang kemudian dapat diterapkan di ruang kelas (Slavin, 2008). Menjadi guru profesional adalah menjadi pebelajar sepanjang hayat terutama tentang proses belajar mengajar dan tentang materi yang diajarkan. Guru profesional menjadikan dirinya guru sekaligus pebelajar, tidak akan berhenti belajar meskipun sudah mendapatkan gelar sarjana dan sertifikat mengajar (Parkay dan Stanford, 1992).

F. Implikasi Masalah Pendidikan Guru

Beberapa masalah yang dihadapi dalam pendidikan guru diantaranya:

1. Kekurangan jumlah guru dalam tiap jenjang persekolahan dan per bidang studi. Jumlah guru yang dibutuhkan tidak seimbang dengan persediaan jumlah guru dibandingkan dengan proyeksi tambahan murid.
2. Masalah mutu, bahwa kualifikasi guru yang diminta oleh SMP/SMA/SMK tidak cocok dengan kualifikasi yang telah tersedia dilihat dari kebutuhan bidang studi.
3. Penyebaran guru tidak seimbang dengan permintaan daerah- daerah yang tersebar luas dengan sebagian besar guru yang ingin bekerja di kota-kota saja.
4. Faktor waktu, bahwa terdapat time lag antara jangka waktu pendidikan pre-service dengan saat di mana para lulusan diperlukan.

5. Karena kurangnya guru, maka pada umunya guru mengajar melebihi beban resmi, hal mana akan berpengaruh pada hasil pendidikan.

G. Solusi Permasalahan Pendidikan Guru

Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) harus betul-betul berorientasi kepada tenaga kependidikan, yakni mendidik calon guru dan tenaga kependidikan lannya. Hal ini perlu mendapat penekanan, agar jangan sampai lulusannnya bekerja di bidang lain dari luar profesi guru. Sasaran utama adalah mempersiapkan calon guru untuk SLTP dan SLTA, seperti: guru untuk SMU, sekolah kejuruan dan teknologi, SMP, dan SKT menengah, pendidikannya difokuskan pada prinsip penyatuan teori praktek.

BAB VIII :
PENDIDIKAN INTERNASIONAL

A. Tendensi dan Latar Belakang Pendidikan Internasioanal

Pendidikan internasional, kurikulum yang diterapkan boleh- boleh saja kurikulum nasional, tetapi di dalamnya disisipkan pendidikan untuk berinternasional. Artinya, anak didik dijejali dengan pendidikan akan hidup dalam suasana damai di dunia, dengan menjunjung tinggi nalai-nilai kemanusiaan, diberikan makna perdamaian internasional, dan arah pendidikan yang lebih baik. Bentuk pendidikan semacam ini bukan dalam tingkat pendidikan teori, namun harus diterapkan secara nyata.

B. Asumsi Pendidikan Internasional

Perbedaan masyarakat atau bangsa yang maju (modern) selain melaksanakan pembangunan fisik mereka membangun mental generasi muda. Untuk itu, mereka tidak ragu mngeluarkan anggaran yang lebih besar untuk pendidikan. Sebaliknya, masyarakat atau bangsa yang tertinggal (tradisional) hanya mengutamakan pembangunan fisik. Selain itu beberapa asumsi yang mendasari pelaksanaan pendidikan Internasional adalah sebagai berikut:

1. Hidup berdampingan secara dinamis jauh akan lebih menguntungkan dari pada bermusuhan antara bangsa dengan bangsa lain.
2. Memahami budaya orang lain akan memperkaya budaya sendiri.

C. Pendidikan Internasional dalam *Inter* Cultural *Education*

1. Pertama, tidak lagi terbatas pada menyamakan pandangan pendidikan (edukation) dengan persekolahan (schooling) atau pendidikan Intercultural dengan program-program sekolah formal. Pandangan yang lebih luas mengenai pendidikan sebagai transisi kebudayaan membebaskan pendidikan dari asumsi bahwa tanggung jawab primer mengembangkan kompetensi kebudayaan di kalangan anak didik semata-mata berada di tangan mereka

dan justru semakin banyak pihak yang bertanggung jawab karena program-program sekolah.

2. Kedua, menghindari pendangan yang menyamarkan kebudayaan- kebudayaaan dengan kelompok etnik adalah sama. Artinya tidak perlu lagi mengasosiasikan kebudayaan semata-mata dengan kelompok-kelompok etnik sebagaimana yang terjadi selama ini. Secara tradisional, para pendidik mengasosiasikan kebudayaan hanya dengan kelompok-kelompok sosial yang relatif sufficient, ketimbang dengan sejumlah orang yang secara terus menerus dan berulang-ulang terlibat satu sama lain dalam satu atau lebih kegiatan. Dalam konteks pendidikan intercultural, pendekatan ini diharapkan dapat mengilhami para penyusun program-program pendidikan Intercultural untuk melenyapkan kecenderungan memandang anak didik secara stereotip menurut identitas etnik mereka dan akan meningkatkan eksplorasi pemahaman yang lebih besar mengenai kesamaan dan akan meningkatkan eksplorasi pemahaman yang lebih besar mengenai kesamaan dan perkembangan di kalangan anak didik dari berbagai kelompok etnik.
3. Ketiga, karena pengembangan kompetensi dalam suatu "kebudayaan baru" biasanya membutuhkan interaksi inisiatif dengan orang-orang yang sudah memiliki kompetensi, bahkan dapat dilihat jelas bahwa upaya-paya untuk mendukung sekolah-sekolah yang terpisah ecara etnik adalah antitesis terhadap tujuan pendidikan intercultural. Mempertahankan dan memperluas solidaritas kelompok adalah menghambat sosialisasi ke dalam kebudayaan baru. Pendidikan bagi pluralisme budaya dan pendidikan Intercutural tidak disamakan secara logis.
4. Keempat, pendidikan Intercultural meningkatkan kompetensi dalam beberapa kebudayaan. Kebudyaan mana yang akan diadopsi ditentukan oleh situasi.
5. Kelima, kemungkinan bahwa pendidikan (baik dalam maupun luar sekolah) meningkatkan kesadaran tantang kompetensi dalam beberapa kebudayaan. Kesadaran seperti ini kemudian akan menjauhkan kita dari konsep dwi budaya atau dkhotomi antara pribumu dan non-pribumi. Dikotomi semacam ini bersifat membatasi individu untuk sepenuhnya mengekspresikan diversitas kebudayaan. Pendekatan ini meningkatkan kesadaran akn intercultural sebagai pengalaman normal manusia. Kesadaran ini mengandung makna bahwa pendidikan intercultural berpotensi untuk menghindari

dikotomi dan mengembangkan apresiasi yang baik melalui kompetensi kebudayaan yang ada pada diri anak didik.

D. Pendidikan Internasional dan Pertukaran Siswa/Mahasiswa

Program pertukaran mahasiswa (studentexchenge) merupakan salah satu program dari pemerintahan Jepang dalam mengembangkan promosi perguruan tingginya kepada masyarakat dunia. Indonesia merupakan salah satu negara yang dijadikan tujuan promosi tersebut. Pemerintahan Jepang banyak menawarkan program student exchange kepada perguruan-perguruan tinggi yang ada di Indonesia diantaranya adalah ITB, IPB, UGM, dan lain-lain.

Untuk perguruan tinggi ITB, pada khususnya banyak program yang ditawarkan yang menyangkut program pertukaran mahasiswa ini diantaranya adalah, Japanese Universities Study of Sience and Technology (JUSST), yang ditawarkan oleh The University of Electro Communications (UEC), yang setiap tahunnya sekitar 4 orang mahasiswa yang diikutsertakan dalam program ini, Young Scientist Exchange Program (YSEP) dan TATO yang ditawarkan Tokyo Institute of Technology dengan jumlah 2 orang untuk YSEP san satu orang untuk program TATO, serta program pertukaran mahasiswa yang khusus perdepartement seperti Teknik Geodesi, Teknik Kimia, Teknik Elektro dan yang lainnya, yang hampir setiap tahun mengirimkan salah satu mahasiswanya untuk mengikuti program pertukaran mahasiswa tersebut. Khusus untuk Tehnik Kimia ada seorang dosen yang langsung menjalin kerjasama dengan salah satu perguruan tinggi di Jepang, yang salah satu bimbingannya akan dikirim selama setahun ke Jepang.

Waktu untuk mengajukan diri menjadi salah satu calon program pertukaran mahasiswa ini yaitu antara bulan April dan Mei, sedangkan pengumumannya sekitar bulan Juli. Sedangkan kegiatan yang dilakukan oleh setiap program berbeda-beda, untuk program JUSST, programnya terbagi menjadi dua bagian. Pertama untuk program penelitian dan yang kedua adalah program perkuliahan, bahasa pengantarperkuliahan adalah bahasa inggris. Sedangkan untuk program YSEP dan SATO adalah program hanya penelitian saja, begitu juga dengan program antar perdepartement programnya hanya bekerjasama penelitian saja. Khusus untuk program JUSST meskipun pada awal keberangkatannya tidak

mempunyai laboratorium, tapi kalau yang master atau undergraduate 4 years bisa mencari professor ketika program berlangsung.

Untuk peserta program pertukaran mahasiswa, karena beasiswanya yang relatif sedikit, dan ini merupakan program pertukaran mahasiswa yang notabene bukan hanya untuk belajar bidangnya saja, tapi juga meliputi pembelajaran mengenai budaya dan yang lainnya, maka disarankan membuat proposal pribadi sebagai pemenuhan kebutuhan anggaran pribadi selama hidup di Jepang, terlebih terhadap orang yang hidup di daerah Tokyo, dengan beasiswa tersebut diperhitungkan tidak akan cukup untuk hidup di Tokyo, terkecuali kalau tinggal di Internasional House.

E. Pelaksanaan Pendidikan Intenasional di Indonesia

Peranan dalam pendidik di kelas adalah sebagai pembimbing. Fasilitator/ pemandu, motivator dan juga sebagai penilai kemampuan siswa. di sisi lain, peranan pendidik adalah sebagai pendesain dan pelaksanaan kurikulum, dan tentu saja sebagai menejer kelas dan anak didik. Dalam pendidikan internasional, para pendidik harus pandai menyelipkan nilai-nilai kemanusiaan ke dalam semua mata pelajaran dan dalam semua kegiatan secara berkelanjutan. Kegiatan yang dirancang haruslah sedemikian rupa sehingga anak didik tidak hanya belajar ilmu, maupun juga belajar nilai.

Tugas ini tentu saja bukan tugas ringan. Apalagi dengan adanya keterbatasan pengetahuan dan pemahaman kita sebagai manusia, namun alangkah baiknya bila kita saling berbagi. Berbagi dalam segala informasi dan pengetahuan, sehingga semua yang kita ajarkan kepada para peserta didik benar-benar yang bermakna. Dengan belajar sendiri (membaca maupun berdiskusi) maupun mengunjungi sekolah-sekolah yang sudah menerapkan Kurikulum 2013 dan bahkan Kurikulum Merdeka Belajar , maka diharapkan semua pendidik memiliki pemahaman serupa tentang kurikulum tersebut. Sehingga ‘pendidikan internasioanal’ bukan sekedar di kulit belaka, namun bisa diterapkan ke dalam semua level sekolah yang ada di seluruh nusantara. Dalam pelaksanaannya, di Indonesia Pendidikan internasional berupa :

1. *Transfer of technology*

   Pertukaran pemuda dan petani ke Negara lain.
2. Penyetaraan pendidik dan peserta didik keluar negeri

Kerja sama Pendidikan dengan universitas di negara lain/ kerja sma kelembagaan.

F. Implikasi Masalah dalam Pendidikan Internasional

Memasuki era global dan pasar bebas, seharusnya sudah ada lembaga pendidikan kita di daerah ini yang mampu bersaing secara internasional dan global, sekurang-kurangnya ada satu TK sampai SMA atau sederajat. kendalanya yang klasik adalah keterbatasan dana, fasilitas, sumberdaya manusia dan sarana lainnya belum siap untuk mendirikan sekolah bertaraf internasional. Kendala yang sesungguhnya bukan itu. Melainkan rendahnya motivasi dan wawasan sebagian pejabat, tokoh masyarakat dan pengusaha kita di daerah ini yang peduli pentingnya pendidikan yang berkualitas tinggi. Sebagaian besar mereka hanya memikirkan kepentingan pribadi, keluarga dan kelompok dalam lingkup sempit dan sangat terbatas.

Sekolah dan madrasah yang bertaraf internasional dengan ciri antara lain dalam kegiatan belajar menggunakan bahasa asing. Dalam interaksi pembelajaran, baik guru maupun siswa, misalnya di sekolah umum menggunakan Bahasa Inggris dan di madrasah menggunakan Bahasa arab atau kedua bahasa tersebut. Sesuai hasil kegiatan workshop School development And Investmen Plan yang dilaksanakan Depdiknas dan ADB di Bogor baru-baru ini untuk SMA yang bertaraf internasional kepala sekolahnya minimal S2, memiliki kemampuan leadership yang menyakinkan, menguasai Bahasa inggris dan Komputer, berpengalaman mengajar minimal 10 tahun.

Sedangkan untuk guru, tingkat pendidikannya minimal S1, bidang pendidikan sesuai dengan mata pelajaran yang dipegang, menguasai Bahasa inggris –minimal nilai TOEFL 550. Guru harus mampu membaca, menulis, mendengarkan dan berbicara dalam Bahasa Inggris dengan baik. Penggunaan Bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar minimal dalam empat mata pelajaran, Fisika, Kimia, Biologi dan pelajaran Bahasa inggris sendiri. Mengenai sarana/fasilitas, SMA level ini harus memiliki luas ruang kelas 63 meter persegi (moving clasrom), khususnya untuk mata pelajaran Matematika, Fisika, Kimia, Biologi, dan Bahasa Inggris, tiap tingkat memiliki minimal 1 PC/laptop, Speaker, LCd, screen project dengan buku pegangan siswa dan referensi yang lengkap, setiap siswa memiliki komputer agar mereka dapat mengakses internet /website. Harus diakui, sekolah bertaraf internasional

memerlukan tidak sedikit SDM pendidikan yang profesional, dana besar dan fasilitas lengkap. Memang, kualitas pendidikan yang kompetitif membutuhkan biaya tinggi.

G. Solusi terhadap Permasalahan Pendidikan Internasional

Banyak alternatif untuk mengembangkan sekolah kita menjadi bertaraf internasional. Satu, melalui APBN/APBD, dengan meningkatkan anggaran 20 persen atau lebih tiap tahun dan dalam waktu dua atau tiga tahun, level sekolah dapat ditingkatkan. Dua, adanya kerjasama di antara pejabat, pengusaha dan tokoh masyarakat sebagai donatur untuk pembiayaannya. Tiga, menjalin kerjasama dengan yayasan atau pengelolaan di luar negeri yang peduli pendidikan tetapi tidak mengikat.

BAB IX :
PENDIDIKAN WANITA

A. Konsep Pendidikan Wanita/Gender

Gender sering dikacaukan pengertiannya dengan jenis kelamin (biologis). Pengertian jenis kelamin merupakan pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Misalnya laki-laki adalah manusia yang memiliki penis dan memproduksi sperma sedangkan perempuan memiliki alat reproduksi, seperti rahim dan saluran untuk melahirkan, memproduksi telur, memiliki vagina, dan mempunyai alat menyusui.

Ketentuan biologis ini secara permanen tidak dapat dipertukarkan dan telah menjadi kodrat dari Tuhan. Lain halnya dengan konsep gender yakni suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural, misalnya bahwa perempuan itu dikenal lembut, cantik, emosional atau keibuan. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, cekatan, dan perkasa. Ciri dan sifat-sifat itu dapat dipertukarkan oleh karena urusan domestik dapat saja dikerjakan oleh kaum laki-laki bukan hanya oleh kaum wanita saja. Sebaliknya, bidang publik dapat juga dilakukan oleh kaum wanita, bukan hanya oleh kaum laki-laki.

B. Urgensi Pendidikan Wanita

Pendidikan sangat dibutuhkan oleh setiap masyarakat desa ataupun kota, berbanding terbalik pemahaman pendidikan masyarakat dahulu yang tidak memprioritaskan melainkan lebih mementingkan pekerjaan. Apalagi di pelosok-pelosok desa pendidikan hanyalah menyia-nyiakan waktu untuk belajar, karena persepektif mayoritas masyarakat pedalaman, orang yang sekolah tidak sekolah pasti akhir-akhirnya bekerja juga. Sedangkan pendidikan untuk kalangan perempuan lebih memprihatinkan, sebab mayoritas orang tua menikahkan anaknya sebelum lulus Sekolah Dasar (SD) karena perempuan pantasnya di dapur, sumur dan kasur.

Definisi perempuan dalam kehidupan adalah sosok yang ikut serta dalam kemajuan Negara seperti pepatah mengatakan "setiap kesuksesan laki-laki di belakang ada seorang perempuan-perempuan akan melahirkan penerus bangsa". Perempuan menurut KBBI (kamus besar bahasa Indonesia) orang yang dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak, dan menyusui. Contonya perempuan yang luar biasa Aisyah isrtri Rasulullah putri Abu Bakar As-Shiddiq adalah perempuan cerdas dalam pembentukan syariat Islam, ia dikenal orang yang menyimpan mushaf Al-Qur'an. Sedangkan perempuan dalam pandangan sejarah kemerdekaan Indonesia, perempuan membentuk sebuah organisasi yang dipelopori oleh R. A. Kartini sebelum tahun 1928 atas usaha Budi Utomo berdirilah organisasi Putri Merdeka di Jakarta. Perempuan dalam sejarah sebagai madrasah pertama untuk putra-putrinya. Pahlawan R. A. Kartini sebagai perempuan yang membela hak perempuan untuk mendapatkan pendidikan, dahulu sangatlah sulit dan banyak rintangan untuk sekolah, karena wanita dilakukan secara tidak adil oleh para kononialisme Belanda.

Perempuan yang berpendidikan tinggi akan mengetahui cara menjadi ibu rumah tangga yang baik, dapat membedakaan mana yang baik dan buruk serta tidak lagi diistilahkan bahwa perempuan tempatnya hanya di dapur, sumur dan kasur, tetapi juga ikut andil terhadap kemajuan dan negara. Jadi, memang benar perempuan tempatnya hanya di dapur, sumur, dan kasur adalah benar kalau ditinjau peran wanita dalam kedudukan keluarga. Sebagaimana sudah kita ketahui dalam keseharian perempuan sebagai ibu rumah tangga melayani anak-anaknya dan suaminya.

Di dalam era Globalisasi pada saat ini, ternyata isu mengenai tingkat pendidikan menjadi salah satu topik yang sangat menarik dan juga sangat relevan untuk dibicarakan di kalangan masyarakat pada saat ini. Karena, proses memperoleh pendidikan mempunyai peranan besar untuk tercapainya suatu tujuan, yaitu perubahan pada pola sikap seseorang untuk menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Tetapi pada kenyataannya, pandangan terhadap kaum wanita di lingkungan masyarakat tertentu di Indonesia pada saat ini masih terlihat sangat minim. Di lingkungan tertentu, kaum wanita bahkan tidak mendapatkan perhatian untuk memperoleh pendidikan sebagaimana mestinya. Bahkan ada juga kaum wanita yang tidak diberikan kesempatan untuk memperoleh pendidikan seperti layaknya kaum pria, apakah hal ini petanda bahwa pendidikan tidak penting bagi kaum wanita?

Pendidikan sangat penting untuk menunjang hidup seseorang, salah satunya yaitu untuk menunjang karir khususnya bagi seorang pria. Walaupun pada kenyataannya seseorang dapat sukses dalam berkarir tanpa melewati jenjang pendidikan, namun sebaiknya seseorang ditunjang dengan pendidikan karena hal tersebut akan lebih baik. Selain untuk menunjang karir seseorang, pendidikan juga berfungsi untuk memperbaiki pola pikir, memperbanyak relasi, dan menambah wawasan yang mungkin akan berguna untuk diri sendiri, keluarga, sahabat, orang lain, dan khususnya bagi seorang suami apabila suatu saat nanti seorang wanita akan menjadi istri.

C. Berbagai Manifestasi Ketidakadilan Gender

1. Gender dan margilisasi perempuan

   Marginalisasi atau pemiskinan adalah proses tindakan yang dilakukan oleh kebijkan pemerintah, keyakinan atau tafsiran agama, tradisi/kebiasaan, bahkan asumsi ilmu pengetahuan yang menyebabkan kemiskinan bagi perempuan. Misalnya: program swadaya pangan atau revolusi hijau secara ekonomis telah menyingkirkan kaum perempuan dari pekerjaannya sehingga memiskinkan mereka. Marginalisasi juga diperkuat oleh adat- istiadat maupun tafsiran keagamaan misalnya banyak di atas suku-suku di Indonesia yang tidak memberi hak kepada kaum perempuan untuk mendapatkan warisan sama sekali (Fakih, 1997:14).

2. Gender dan subordinasi

   Pandangan gender tenyata bisa menimbulkan subordinasi terhadap perempuan. Anggapan bahwa perempuan itu irrasional atau emosional sehingga perempuan tidak bisa tampil memimpin, berakibat munculnya sikap yang menempatkan perempuan pada posisi yang tidak menguntungkan.

3. Gender dan stereotype

   Stereotipe adalah penandaan terhadap suatu kelompok tertentu. Stereotipe pada perempuan, misalnya lawan jenisnya, maka setiap ada kasus kekerasan atau pelecehan seksual selalu dikaitkan dengan stereotipe ini. Bahkan, jika ada pemerkosaan yang dialami perempuan, masyarakat cenderung menyalahkan korbannya

4. Gender dan kekerasan

Kekerasan (violence) adalah serangan terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Kekerasan gender, diantaranya: perkosaan terhadap perempuan, pemukulan/serangan fisik dalam rumah tangga, bentuk penyiksaan yang mengarah pada organ alat kelamin, misalnya penyunatan pada anak perempuan, pelacuran, pornografi, pemaksaan sterilisasi dalam KB, kekerasan terselubung dan pelecehan seksual.

5. Gender dan beban kerja perempuan

Adanya anggapan bahwa kaum perempuan memiliki sifat memelihara dan rajin, serta tidak cocok menjadi kepala rumah tangga berakibat semua pekerjaan rumah tangga menjadi tanggung jawab perempuan. Konsekuensinya, banyak kaum perempuan yang harus bekerja keras dan lama, terlebih jika sebagai kariawan atau pekerja di luar rumah, maka ia memikul beban kerja ganda. Biar gender ini mengakibatkan beban kerja perempuan ke arah pekerjaan domestik yang dianggap dan dinilai lebih rendah daripada jenis pekerjaan laki-laki, sehingga dikategorikan bukan produktif dan tidak diperhitungkan dalam statistik ekonomi negara.

D. Faktor Penyebab Ketidakadilan Gender

1. Kebijakan negara untuk perempuan
   a. UUD 1945 (pasal 27 ayat 20) yang berbunyi; “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kehidupan”. Dalam prakteknya, kaum perempuan lebih banyak bekerja pada bidang domestik daripada publik atau politik.
   b. UU No. 1 tahun 1951 tentang pernyataan berlakunya UU no.12 tahun 1948 (pasal 1) tidak diperbolehkan perempuan yang bekerja umur 14 tahun ke bawah, tetapi kenyataannya hal ini tidak ditepati.
   c. UU No. 7 tahun1984 tentang penghapusan segala diskriminasi terhadap perempuan, namun hasil penelitian menunjukkan bahwa semua menganggap tenaga kerja wanita sebagai bujangan implikasi diskriminasi imbalan jasa (Djumialdji, 1989:58).
   d. Ketentuan tentang keselamatan dan kesehatan kerja (pasal 3 ayat 1) belum mencapai tujuan, tampak ada pelanggaran mempekerjakan tenaga kerja wanita yang hamil dan masih di bawah umur.
   e. Ketentuan tentang perlindungan khusus bagi wanita (UU No.12 tahun 1998) yang meliputi cuti haid, cuti hamil, melahirkan serta kesempatan menyusui anak ternyata

dalam praktek, cuti haid tidak selalu diberikan dan diganti dengan uang insentif. Bahkan tenaga kerja wanita terpaksa mengundurkan diri bila hamil atau diadakan pemutusan kerja (PHK)

f. Konvensi pengupahan yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk pekerja yang sama nilainya. Pada prakteknya dana kesehatan yang dimiliki istri sebagai pegawai tidak diperhitungkan.

E. Mendidik Anak Perempuan Menampung Masa Depan

Menurut Martoenoes Arifin ada beberapa asumsi yang mendasari pelaksanaan pandidikan wanita, yaitu:

1. Bahwa anak laki-laki itu secara kodrat di karuniai kelebihan dari laki-laki oleh karena laki-laki adalah pemimpin atau membimbing bagi wanita.
2. Wanita di samping memiliki kekurangan, juga memiliki kelebihan dari laki-laki oleh karenanya wanita jika memperolah kesempatan yang sama untuk hal yang netral dapat berprestasi sama dengan laki-laki dan untuk hal-hal khusus bahkan dapat melampaui prestasi laki-laki.

Asumsi kedua lebih realist dan lebih tepat untuk lanjutan pendidikan gender. Sementara pelaksanaan pendidikan wanita menurutnya bahwa:

1. Pendidikan wanita yang diberikan ke sistem persekolahan menampilkan program khusus pendidikan wanita.
2. Pendidikan wanita di keluarga merupakan dasar dan penunjang pelajaran pendidikan wanita di sekolah.
3. Pendidikan wanita untuk menunjukkan keterampilan kerja dapat dilaksanakan di lingkungan kerja atau di berikan koordinasi lingkungan kerja.

F. Konsep Citra Wanita

1. Citra wanita dalam aspek fisik

   Menurut Saldi (1988-164) citra fisik wanita adalah citra fisik dewasa, wanita yang sudah berumah tangga. Secara fisiologis, wanita dewasa dicirikan oleh tanda-tanda jasmani, antara lain: dengan dialaminya haid dan perubahan fisik lainnya seperti tumbunya bulu

di bagian badan tertentu, perubahan suara, siklus haid, buah dada membesar dan lain sebagainya. dalam aspek fisik ini, wanita mengalami hal-hal yang khas, yang tidak dialami pria, misalnya hanya wanita yang bisa hamil, melahirkan dan menyusui anak-anaknya.

2. Citra wanita dalam aspek psikis

Ditinjau dari segi psikisnya wanita adalah mahluk yang berfikir, berperasaan dan beraspirasi. Dengan meningkatkan faktor fisik dan psikis, keduanya ikut mempengaruhi dan menentukan citra perilakunya. Kartono (1981:175) dalam aspek psikisnya kejiwaan wanita dewasa ditandai antara lain oleh sikap bertanggung jawab penuh terhadap diri sendiri. Ada keputusan hati yang dipilih wanita sesuai dengan aspek psikisnya sebagai wanita dewasa. Berbagi aktivitas yang ditempuhnya sebagai konsekuensi tanggung jawab pembentukan pribadi. Selanjutnya Kartono mngatakan bahwa aspek psikis ini dapat dicitrakan dari gambaran pribadi, dengan memilih relasi sosial yang sifatnya stabil. Misalnya perkawinan, pilihan sikap, pilihan pekerjaan dan sebagainya. citra wanita dalam aspek psikis adalah wanita dewasa yang berkarakteristik stabil, wanita yang tetap memilih perannya, baik sebagai ibu rumah tangga, istri, pembantu rumah tangga, maupun sebagai individu wanita secara umum. Sugiastuti (2000:107) berpendapat bahwa psikis wanita tercitrakan pula sebagai insan yang bersifat sosial. Artinya, wanita menonjolkan sifat sosialnya dan memperhatikan sesama kaumnya. Sikap ini memperhatikan wanita sebagai insan sosial mencari perhatian di luar dirinya, yang juga diarahkan kepada suami dan anak-anaknya. Wanita dicitrakan sebagai pengasuh suami dan akan-anaknya, yang dituntut dengan rasa keibuan. Oleh karena itu, psikis wanita tercitrakan sebagai psikis orang terbuka, sehingga ia cepat membuka diri bagi orang lain baik sesama wanita maupun bagi lawan jenis.

3. Citra diri wanita

Berdasarkan klasifikasi citra fisik dan psikis maka dapat diabstaraksikan kedua citra diri wanita. Dalam hal ini wanita dewasa menjadi subjek yang aktif dan dinamis. Dari aspek fisik citra wanita itu melalui pengalaman-pengalaman tertentu yang dialaminya, yang tidak dialami oleh pria misalnya sobeknya selaput darah, melahirkan dan menyusui

anaknya. Citra diri wanita ini berbeda juga dengan pria antara lain fisik yang lembut, lincah dan lemah, struktur tingkah lakunya cara berpakaian dan citra fisiknya. Citra diri wanita memperlihatkan bahwa apa yang dipandang sebagai perilaku wanita bergantung pada bagaiman aspek fisik disosialisasikan dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Nilai-nilai itu terwujud atas dasar pandangan wanita itu sendiri dan pandangan pria dalam masyarakat. Dengan demikian sebenarnya aspek fisik, psikis dan sosial itu saling berkaitan sebagai pendukung terciptanya citra diri wanita.

4. Citra sosial wanita

Citra wanita dalam aspek sosial yaitu peran wanita dalam keluarga dan peran wanita dalam masyarakat. Peran ialah yang dimainkan oleh seseorang pada setiap keadaan dan cara tingkah laku untuk menyelaraskan diri dan keadaan (Wolfman, 1989:10). Peran dapat berarti seperangkat tingkah yang diharapankan dimiliki oleh seseorang yang berkedudukan dalam masyarakat. Peranan wanita artinya bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan wanita, yaitu ada tujuh peranan yang dapat dimainkan wanita yang sebagian berorientasi pada keluarga dan sebagian berorientasi pada masyarakat. Ketujuh peranan tadi adalah: 1). Sebagai orang tua, 2). Sebagai istri, 3). Di dalam rumah tangga, 4). Dalam kekerabatan, 5). Pribadi, 6). Komunitas, dan 7). Di dalam pekerjaan (Oppong dan Church, 1981:1) peran-peran itu menyangkut peran wanita sebagai individu dan peran wanita sebagai mahluk sosial.

G. Ideologi Gender dan Pengembangan Karier Perempuan

Sejumlah literatur mengkonfirmasikan bahwa wanita sebagai kelompok lebih terkonsentrasi pada pekerjaan-pekerjaan status rendah, gaji rendah, dan tidak diperhitungkan atau tidak dianggap sebagai pekerjaan- pekerjaan rumah tangga atau peran kerumah-tanggan, dan karir-karir atau peran-peran yang dianggap sekunder (prioritas kedua). Jika wanita bekerja di luar rumah, maka pekerjaan yang tidak terlalu menuntut pemikiran rumit, atau jenis pekerjaan yang menuntut keterampilan praktis, misalnya pekerjan sebagai guru, sekretaris, perawat (Brown&Brools, 1987:isaacson&Brown, 1993).

Walaupun jenis pekerjaan seperti guru, sekertaris dan perawat seolah-olah lekat pada perempuan (sterotip gender), namun jika pekerjaan tersebut ditingkatkan ke jenjang yang

lebih seperti menjadi kepala sekolah, sekertaris wilayah daerah, dan kepala keperawatan, maka tidak secara otaomatis jenis-jenis pekerjaan tersebut menjadi milik perempuan.

Sistem patriarkhi yaitu suatu sistem hubungan sosial antara wanita dan pria dimana pria mendominasi kehidupan wanita kehidupan wanita, agaknya telah menghambat perempuan untuk melangkah maju yang bekerja sebagai guru diarahkan untuk menangani pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan kegiatan intern sekolah, dan jika pekerjaan tersebut menyangkut aspek yang lebih luas maka hal itu menjadi tugas guru pria.

Benedetto&Tittle (dalam Isacson&Brown, 1993) mengemukakan bahwa salah satu perbandingan yang sering digunakan sebagai pendekatan untuk membedakan proses perencanaan karir antara pria dan wanita adalah dengan melihat perbedaan-perbedaan perspektif di antara mereka. Dalam hal ini wanita merecanakan pekerjaan/karie mereka berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang berhubungan dengan keluarga atau karir. Sementara pria merencanakan karir berdasar pada peran-peran yang bersifat independen selanjutnya dikemukakan bahwa anggota gerakan gender menemukan bahwa faktor-faktor lain yang mempengaruhi perkembangan karir wanita antara lain: tujuan-tujuan hidup, perilaku interpersonal, dan masalah-maslah insidentil seperti perkosaan, dan pelecehan seksual (Isaacson&Brown,ibid). Dalam pengembangan profesi, wanita sering diperhadapkan pada perlakuan diskriminasif (Smita&kristi, 1997), karena perempuan mengalami masa perubahan biologis, seperti mestruasi dan kehamilan. Juga wanita mengalami konflik peran sebagai konsekuensi dari peran gandanya.

Demikian pula dengan kesempatan untuk melanjutka studi, mengikuti seminar, penataran atau pelatihan, dan kegiatan-kegiatan yang relevan dengan ilmunya. Faktor lain yang mendasar sehubungan dengan pemilihan dan pengembangan karir tidak hanya didasarkan pada bagaimana mereka memandang diri sendiri, dan melakukan pilihan-pilihan karir, tetapi juga dipengaruhi oleh bagaimana orang lain (pekerja-pekerja lain atau rekan kerja) menerima dan berinteraksi dengan mereka, dan hal ini sangat mempengaruhi pilihan kesuksesan dan mobilitas karir mereka.

Bagi guru wanita, dikotomi peran gender menimbulkan sejumlah problom, antar lain: Pertama, sekalipun mereka telah menekuni karir sebagai guru, terjun kedua publik produktif, namun mereka tetap dituntut bertanggung jawab terhadap penyelesaian tugas-tugas domestik reprduktif. Kedua, dalam melaksanakan tugasnya sebagai guru di sekolah, mereka dituntut

memperhatikan kinerja profesionalnya. Banyaknya waktu dan tenaga yang dikeluarkan dalam merampung tugas-tugas domestik reproduktif menyebabkan guru wanita tersebut kehilangan banyak kesempatan menekuni tugas profesionalnya. Akibatnya kinerja dan etos kerja mereka pun menjadi rendah. Kondisi seperti itu pada akhirnya sering kali dijadikan alasan pembenaran bahwa mereka tidak layak untuk dipromosikan menjadi kepala sekolah yang membutuhkan pengerahan perhatian yang lebih besar.

H. Wanita dan Kepemimpinan

Dalam masyarakat modern, pajangan tersebut di atas telah bergeser dan mulai ditinggalkan. Wanita telah memahami bahwa pendidikan adalah "sarana yang ampuh untuk menghapus kesenjangan dan menciptakan kesamaan (Naisbit, 1995). Golemen (1996) mengemukakan bahwa sesungguhnya" manusia memiliki dua sisi kemampuan, sisi ang satu adalah kemampuan untuk menggunakan rasionya, dan sisi yang lain adalah kemampuan untuk menggunakan perasaan/emosinya. "pertama, merupakan kemampuan rasional, adalah model pemahaman yang lazim disadari: lebih menonjol kesadarannya, bijaksana, mampu bertindak hati-hati dan merefleksi. Kedua, merupakan kemampuan emosional, yaitu model pemahaman yang impulsif dan berpengaruh besar dan kadang-kadang tidak logis. Pikiram yang pertama, lebih menekankan pada upaya untuk memecahkan masalah secara logis rasional dengan memanfaatkan kemampuan rasio/akal. Yang selanjutnya dikenal dengan kecerdasaran intelektual (IQ). Sedangkan yang kedua, lebih menunjukkan pada kemampuan merespon setiap fenomena secara pikologis-emosiona, yang selanjutnya dikenal dengan sebagai kecerdasan emosional (EQ).

BAB :
X PENDIDIKAN SEKS

A. Asumsi dan Konsep Pendidikan Seks

1. Menurut S.Freud manusia pada hakekatnya adalah Homo artinya dalam berbuat selalu terdorong dari dalam. Apakah yang terdorong dari dalam itu? Bagi Freud adalah libido seksual akan dorongan seks.
2. Dorongan seks (Libido) itu sudah ada sejak manusia itu selagi bayi bagi prilaku bayi mengisap jari, membawa apa saja yang dipegangnya kemulut, bermain dengan sendiri, merasa senang membuka baju dan mempertontonkan auratnya kepada orang lain, hal tersebut dapat diterjemahkan/diklasifikasikan dari libido sekaligus itu. Perkembangan libido seksualitas dari anak ke orang dewasa merupakan perkembangan alami.
3. Freud membedakan seks pada anak dan seks pada orang dewasa sbb: "bahwa seks pada anak dalam arti sesungguhnya belum". Seks pada anak barulah dalam arti kelunakan atau dalam arti erotis (rasa senang). Misalnya arti merasa senang dan puas mengisap jarinya bahkan tidur nyenyak karenanya. Sedang anak akan merasa sedang mempertontonkan kepada oarng lain.
4. Bagi Freud semua itu merupakan hal yang penting janganlah sampai mengalami siksa (terikat pada keadaan lampau). Contoh fiksasi itu makanya orang dewasa berlebihan menanamkan fiksasi pada net. Orang dewasa/perempuan yang senang berpakaian serba modern yang menanamkan fiksasi pada fase genetika, dsb.
5. Menurut W. Sterm (Paedagago Belanda) cinta sejati adalah cinta seorang ibu terhadap anaknya. Cinta terhadap manusia lainnya bukanlah cinta sejati, karena masih dicampur oleh unsur biologis.
6. Pendidikan terhadap seks terdahulu pula bertumbuh pada pemenuhan kebutuhan terhadap seks itu, sehingga kita memiliki satu konsep pendidikan seks yang kuat dan jelas apabila pendidikan seks itu hendaknya dilaksanakan di sekolah.

7. Salah satu prinsip pendidikan mendasar tentang seks tadi, contoh dalam pendidikan seks itu semua masyarakat perlu diadakan. Adapun yang perlu dicegah adalah masyarakat yang bersifat keras, jadi pendidikan seks yang blak-blakan tidak sesuai dengan kodrat awal (kelunakan).
8. Oleh karenanya strategi pendidikan seks yang tepat bukan *I adone you help, expose you*. Jadi tidak membiarkannya secara terbuka melainkan lebih mendalam dengan perasaan-perasaan yang jelas.

B. Pendidikan Seks di Keluarga

Membuka komunikasi mengenai seksualitas harus dijalin sejak kecil memulai pendidikan seks dalam keluarga. Seks juga dilihat bukan sebagai sesuatu yang tabu, tetapi merupakan bagian dari kehidupan manusia dalam proporsi yang wajar. Bila seks masih dianggap tabu, maka akan banyak ditemukan salah pengertian dan problema seksual yang terselubung. Akibantnya timbul berbagai masalah seksual dan kejiwaan.

C. Peranan Sekolah dalam Pendidikan Seks

Tujuan pendidikan seks di sekolah seperti yang diungkapkan oleh Federasi Kedidupan Keluarga Internasional ialah:

1. Memahami seksualitas sebagai bagian dari kehidupan yang esensi dan normal.
2. Mengerti perkembangan fisik dan perkembangan emosional manusia.
3. Memahami dan menerima individualitas pola perkembangan pribadi.
4. Memahami kenyataan seksualitas manusia dan reproduksi manusia.
5. Mengkomunikasikan secara efektif tentang pertanyaan- pertanyaan yang berkenaan dengan seksualitas dan prilaku sosial.
6. Mengetahui konsekuensi serta pribadi sosial dari sikap seksual yang tidak bertanggung jawab.
7. Mengembangkan sikap tanggung jawb dalam hubungan interpersonal dan prilaku sosial.
8. Mengenal dan mampu mengambil langkah efektif terhadap penyimpangan prilaku seksual.
9. Merencanakan kemandirian di masa depan, sebuah tempat dalam masyarakat, pernikahan dan kehidupan keluarga.

Bagi guru yang memberikan pendidikan seks, Killander (1971) mengungkapkan bahwa guru mempunyai peran yang besar, yaitu:

1. Membantu menyeleksi sasaran sosialitas dan pribadi yang dapat dicapai oleh anak didik.
2. Membantu siswa untuk menyadari bahwa sarana tersebut sesuai untuk mereka dan membimbing mereka untuk menerimanya sebagai bagian dari hidup.
3. Membimbing mereka untuk memilih aktivitas-aktivitas dan pengalaman yang baik dalam merencanakan masa depan.

Oleh karena itu, Flake-Hobson (Joice, 1996) menyatakan bahwa pendidikan seks di sekolah harus meliputi pengajaran antara lain:

1. Mengizinkan anak untuk berperan sesuai dengan jenis kelamin dalam ekspresi mereka, kepribadian mereka dan interaksi mereka dengan teman-temannya di kelas.
2. Mengajak siswa untuk berdiskusi mengenai hal-hal yang berkenaan dengan sopan santun terhadap lawan jenis.
3. Memperkenalkan siswa terhadap perkembangan peran seks. Misalnya seorang perempuan akan menjadi siswa yang berstatus ibu rumah tangga atau istri.
4. Menyediakan akat-alat audio visual mengenai perkembangan peran seks kepada siswa dan mengajak mereka untuk berdiskusi.
5. Memperkenalkan siswa kepada bermacam-macam peran seks antara laki-laki dan perempuan.

Tukan (1993) menguraikan materi pendidikan seks di sekolah sebagai berikut:

1. Siswa SD kelas 5 dan 6

   Tentang ciri seksualitas primer dan sekunder serang pria, proses terjadinya mimpi basah, menjaga kebersihan kelamin, memakai bahasa yang baik dan benar tentang seks, kepribadian seorang siswa.
2. Siswa SMP kelas 2 dan 3

   Memperluas apa yang telah dibicarakan di SD kelas 5 dan 6, yakni identitas remaja, pergaulan, dari mana kau berasal, proses melahirkan, dan tanggung jawab moral dalam pergaulan.
3. Siswa SMA/SMK kelas 1 dan 2

Mendalami lagi apa yng telah diberikan di SD dan SMP yakni secara psikologi pria dan wanita, paham keluarga secara sosiologi, masalah pacaran dan tunangan, komunikasi, pilihan cara hidup menikah atau membujang, pergaulan pria dan wanita, tubuh manusia yang bermakna, penilaian etis yang bertanggung jawab sekitar masalah-masalah seksual dan perkawinan.

Dengan demikian, peranan sekolah dalam memberikan pendidikan seks merupakan suatu tanggung jawab moral bagi perkembangan anak didik. peranan sekolah harus dimengerti bahwa sekolah merupakan suatu institusi yang bersifat komplomenter dan membantu orang tua dalam memperlancar tugas dan peranan orang tua terutama dalam menanamkan sikap dan prilaku seksual anak terhadap hakikat seksualitas manusia. Pendidikan seks haruslah dipandang sebagai suatu proses pengalihan nilai-nilai tentang seks yang benar yang didapat anak sebagai bimbingan, teladan dan kepedulian para orang tua dan pendidik dalam membantu anak membangun sikap batin yang sesuai dengan kodrat: manusia, tidak hanya akal budi tetapi juga hati nurani. Pendidikn seks juga mempunyai fungsi memberikan landasan dalam membangun suatu hubungan yang objektif dan wajar antara anak dengan tubuhnya.

D. Tujuan Pendidikan Seks

Tujuan pendidikan seks sesuai usia perkembangan pun berbeda- beda. Seperti pada usia balita, tujuannya adalah untuk memperkenalkan organ seks yang dimiliki, seperti menjelaskan anggota tubuh lainnya, termasuk menjelaskan fungsi serta cara melindunginya. Jika tidak dilakukan lebih awal maka ada kemungkinan anak akan mendapatkan banyak masalah seperti memiliki kebiasaan suka memegang alat kemaluan sebelum tidur, suka memegang payudara orang lain atau masalah lainnya.

Untuk usia sekolah mulai 6-10 tahun, pendidikan seks bertujuan untuk memahami perbedaan jenis kelamin (laki-laki dan perernpuan), menginformasikan asal-usul manusia, membersihkan alat genital dengan benar agar terhindar dari kuman dan penyakit. Sedangkan usia menjelang remaja, pendidikan seks bertujuan untuk menerangkan masa pubertas dan karakteristiknya, serta menerima perubahan dari bentuk tubuh. Secara garis besarnya,

pendidikan seks diberikan sejak usia dini (dan pada usia remaja) dengan tujuan sebagai berikut:

1. Membantu anak mengetahui topik-topik biologis seperti pertumbuhan, masa puber, dan kehamilan
2. Mencegah anak-anak dari tindak kekerasan.
3. Mengurangi rasa bersalah, rasa malu, dan kecemasan akibat tindakan seksual.
4. Mencegah remaja perempuan di bawah umur dari kehamilan.
5. Mencegah remaja di bawah umur terlibat dalam hubungan seksual Mengurangi kasus infeksi melalui seks.
6. Membantu anak muda yang bertanya tentang peran laki-laki dan perempuan di masyarakat.

E. Remaja dan Pendidikan Sex Pra Nikah

Pengetahuan seks yang hanya setengah-setengah tidak hanya mendorong remaja untuk mencoba-coba, tetapi juga bisa menimbulkan salah persepsi. Misalnya saja, berciuman atau berenang di kolam yang "tercemar" sperma bisa mengakibatkan kehamilan, mimpi basah dikira mengidap penyakit kotor, kecil hati gara-gara ukuran penis kecil, sering melakukan onani bisa menimbulkan impotensi.

Beberapa akibat yang tentunya memprihatinkan ialah terjadinya pengguguran kandungan dengan berbagai resikonya, perceraian pasangan keluarga muda, atau terjangkitnya penyakit menular seksual, termasuk HIV yang kini sudah mendekam di tubuh ratusan orang Indonesia. Bandingkan dengan temuan M. Maheu, Ph. D., psikolog yang berpraktek di California, AS, bahwa setiap tahun terdapat 1 dari 18 gadis remaja Amerika Serikat hamil sebelum menikah dan 1 dari 5 pasien AIDS tertular HIV pada usia remaja.

Melihat kenyataan itu, pendidikan seks secara intensif sejak dini hingga masa remaja tidak bisa ditawar-tawar lagi. Apalagi mengingat, "Sebagian besar penularan AIDS terjadi melalui hubungan seksual," tegas Boyke yang juga pengasuh rubrik konsultasi seks di majalah dan radio. Kalau tidak, mereka yang kini remaja tidak bisa berbuat banyak saat memasuki usia produktif di abad XXI mendatang.Seperti dikutip Boyke, survai oleh WHO tentang pendidikan seks membuktikan, pendidikan seks bisa mengurangi atau mencegah

perilaku hubungan seks sembarangan, yang berarti pula mengurangi tertularnya penyakit-penyakit akibat hubungan seks bebas.

Disebutkan pula, pendidikan seks yang benar memasukkan unsur- unsur hak asasi manusia. Juga nilai-nilai kultur dan agama diikutsertakan di dalamnya sehingga akan merupakan pendidikan akhlak dan moral juga. Dengan itu diharapkan angka perceraian yang berdampak kurang baik terhadap anak-anak pun dapat dikurangi. Hanya yang terjadi hingga kini, "Pendidikan seks di Indonesia masih mengundang kontroversi. Masih banyak anggota masyarakat yang belum menyetujui pendidikan seks di rumah maupun di sekolah." Tutur dr. Gerard paat, konsultan keluarga RS Sint Carolus.

F. Pacaran dan Pendidikan Sex Pra nikah

Pendidikan seks di sekolah hendaknya tidak terpisah dari pendidikan pada umumnya, dan bersifat terpadu. Ia bisa dimasukkan ke dalam pelajaran ilmu Biologi, kesehatan, moral dan etika secara bertahap dan terus menerus. Mereka mensyaratkan pendekatan pada pendidikan moral, meski tidak perlu sedetail pendidikan agama, agar pendidikan seks diterima murid sebagai suatu ilmu yang tidak untuk dipraktekkan sebelum waktunya. Sekali waktu penyuluhan seks juga perlu diadakan. Misalnya, soal menghadapi masa haid dan mimpi basah bila diberikan kepada anak kelas 6 SD, proses terjadinya bayi (spermatozoa bertemu dengan sel telur) mulai diberikan kepada murid SMP. Selanjutnya masalah kebebasan seks, alat kontrasepsi sampai hubungan seks (bukan tekniknya) diberikan kepada anak SMA/SMK.

Pemberian pengetahuan seks mesti di rumah dilakukan sejak dini dan dimulai dengan perilaku keseharian anak-anak. Ketika masih anak-anak misalnya, berikan pengertian kepada mereka agar tidak keluar dari kamar mandi sambil telanjang, menutup pintu kamar mandi ketika sedang mandi, mengetuk pintu terlebih dahulu sebelum masuk kamar orang tua.

Ketika sudah menginjak bangku SD, remaja putri khususnya, mesti sudah dipersiapkan menghadapi masa akil balik. Pada usia sekitar 14 tahun, remaja putri maupun putra rata-rata mulai ingin tahu segala sesuatu tentang lawan jenisnya. "ini merupakan proses pendewasaan diri, dan tidak bisa dicegah, "tegas Boyke. Di sinilah orang tua mesti mulai lebih sering mengadakan pendekatan dan memasukkan nilai-nilai moral kepada anak.

Pada saat mereka mulai pacaran di usia yang cukup, kata Boyke, tak perlu dilarang-larang. Berpacaran merupakan latihan pendewasaan dan pematangan emosi. Dengan berpacaran mereka bisa merasakan rindu atau rasa memiliki, berlatih bagaimana harus bersharing dengan pasangan. Pada masa ini orang tua remaja putri hendaknya berperan menjadi teman berdiskusi sambil meneliti siapa pacarnya itu.

Dalam hal ini dibutuhkan komunikasi lebih terbuka antara orang tua dan anak. Melalui komunikasi, yang acap kali banyak diabaikan perannya, orang tua dapat memasukkan hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Misalnya, batas mereka boleh bermesraan dan apa konsekuensinya kalau batas itu dilanggar. Kepercayaan dari orang tua akan membuat mereka lebih bertanggung jawab.

G. Remaja, Pornografi dan Pendidikan Sex

Survey terhadap pornografi menggambarkan, banyak media massa yang masuk kategori porongrafi, di dalamnya memuat isi dan gambar secara vulgar dan permisif. Banyak foto perempuan yang berpose seronok dan berpakaian mini, bahkan hanya ditutupi daun pisang, dan masih banyak kasus serupa yang seringkali masih saja menghiasi wajah media massa kita. Situasi maraknya pornografi sebagai media yang menyesatkan hingga berimplikasi terhadap dekadensi moral, kriminalitas, dan kekerasan seks yang dilakukan remaja, sesungguhnya bukan sebuah kasus baru yang mengisi lembaran surat kabar ataupun media elektronik. Kasus-kasus kekerasan seksual, kehamilan tidak dikehendaki (KTD) pada remaja dan sejenisnya, tampaknya masih belum banyak diangkat ke permukaan sehingga "seolah-olah" maasalah ini dianggap "kasuistik" yang tidak penting untuk dikaji lebih jauh. Padahal, timbulnya kasus-kasus seputar KTD remaja, kekerasan seksual, penyakit menular seksual (PMS) pada remaja bahkan sampai aborsi, tidak lepas dari (salah satunya) minimnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi remaja.

Masih sangat sedikit pihak yang mengerti dan memahami betapa pentingnya pendidikan seksualitas bagi remaja. Faktor kuat yang membuat pendidikan seksualitas sulit diimplementasikan secara formal adalah persolan budaya dan agama. Selain itu, faktor lain yang ikut mempengaruhi adalah kentalnya budaya patriarki yang mengakar di masyarakat. Seksualitas masih dianggap sebagai isu perempuan belaka. Pornografi merupakan hal yang ramai dibicarakan kerana berdampak negatif, dan salah satunya upaya membentengi remaja

dari pengetahuan seka yang menyesatkan adalah dengan memberikan pendidikan seksualitas yang benar. WHO mnyebutkan ada dua keuntungan yang dapat diperoleh dari pendidikan seksualitas. Pertama, mengurangi jumlah remaja yaang melakukan hubungan seks sebelum menikah. Kedua, bagi remaja yang sudah melakukan hubungan seksual, mereka akan melindungi dirinya dari penularan penyakit menular seksual dan HIV/AIDS.

DAFTAR PUSTAKA

Abrasyi, Al. Athiyah, DR Muhammad, *Dasar-Dasar Pokok Pendidikan Islam*, (Terjemahan) Bulan Bintang, Jakarta 1970.

Alexander. WM. *Secondary Education*, Renehart & Company Inc., New York 1956.

Anderson, Robert N., *Teaching in World of Change*. Narcourt, Brace and World Inc., New York 1966.

Ali Saifuddin, *Agama Filsafat dan Keberdayaan,* Lembaga Penerbit IKIP, Malang 1970

Billy Cyrill, 1957, *Sex Education: A Guide For Parents, Teacher And Youth Leader*, New York, St. Maretin's.

DriyarkaraSI., Prof. DR. *Filsafat Manusia*. Penerbit Kanisius, Yogyakarta 1969.

Durjheim, Emile, *Pendidikan Moral*, (Alih bahas oleh Drs. Lukas Ginting), Penerbit Erlangga, Jakarta 1990.

Fakih, M. 1997. *Analisis Jender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pitik Pelajar Offset.

Hamalik Oemar, 2002. *Pendidikan Guru*. Bumi Aksara; Bandung

KI Hajar Dewantara, *Masalah Kebudayaan , (Kenangaan Promosi Doktor Hinpris Causa)*, BP Taman Siswa, Yogyakarta 1957.

Klubertanz, George P., *The Philosophy of Humas Nature, Apsleton century*, New York 1953.
Kartono, Kartini, 1981. Psykologi Wanita 1. Alumni.

Nurhikmah.2018. *Kapita Selekta Pendidikan*. Makassar : Universitas Negeri Makassar Press.

Sugiasturti. 2000. *Wanita di Mata Wanita*. Bandung: Yayasan Nuansa Cendekia.

Syaharudin dan Susanto, Heri.2019. *Sejarah Pendidikan Indonesia*. Banjarmasin : Universitas Lambung Mangkurat Press.